

## BAB I PENDAHULUAN

### A. PENEGASAN JUDUL

Sebagai langkah awal untuk memahami judul penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis berpendapat perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul penelitian ini. Judul penelitian ini adalah **“ANALISIS FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 – 2019 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

Arti dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. **Analisis** adalah memecahkan atau menguraikan satu unit menjadi berbagai unit terkecil.<sup>1</sup>
2. **Fenomena** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal-hal yang dapat disaksikan oleh indera, dan hal-hal yang dapat dijelaskan dan dievaluasi secara ilmiah.<sup>2</sup>
3. ***Flypaper Effect*** merupakan kondisi dimana pemerintah daerah membelanjakan lebih banyak dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakan kapasitas sendiri (diwakili oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD)).<sup>3</sup>
4. **Dana Alokasi Umum (DAU)** adalah hibah besar yang diberikan kepada seluruh daerah dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan finansialnya, dan dialokasikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.<sup>4</sup>
5. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan legal lainnya.<sup>5</sup>
6. **Belanja Daerah** merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran, dan kewajiban tersebut diakui sebagai jumlah yang dikurangkan dari nilai kekayaan bersih yang tidak akan dibayarkan kembali di daerah.<sup>6</sup>
7. **Ekonomi Islam** Dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang dapat membantu mewujudkan kesejahteraan manusia dengan mengalokasikan sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup>

### B. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahan. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Otonomi daerah adalah munculnya perbedaan daerah, salah satunya adalah kemampuan keuangan daerah, sehingga keuangan daerah menjadi salah satu indikator yang menentukan kemampuan rumah tangga daerah dalam mengelola daerah.”<sup>8</sup> Dalam reformasi sektor publik saat ini, diperlukan demokratisasi. Tuntutan demokratisasi ini terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Keduanya sangat penting dalam pemerintahan, terutama dalam keuangan pusat dan

---

<sup>1</sup>Sofyan syafri harahap, *analisis laporan keuangan*,(jakarta:PT. Raja grafindo, 2004), h.189).

<sup>2</sup>Definisi fenomena (on-line), tersedia di : <https://kbbi.web.id/fenomena> (diakses pada tanggal 14 desember 2020, pukul 15:11 WIB).

<sup>3</sup>Wia Rizki Amalia, Wahyudin Nor dan M.Nordiansyah, “Fenomena *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2009 – 2013”. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.15 No.1 (Februari 2015), h.2.

<sup>4</sup>Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada, 2014), h.63.

<sup>5</sup>Hanif Nurholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta, Grasindo, 2007), h.182.

<sup>6</sup>Moh.Khusaini, *Keuangan Daerah*, Cet I (Malang, UB PRESS, 2018), h.173.

<sup>7</sup>Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), h.5.

<sup>8</sup>*Ibid*, h.1.

daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Kebijakan desentralisasi mencerminkan proses reformasi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu, khususnya di negara berkembang, perubahan politik dan sosial budaya ditandai dengan perpindahan pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.<sup>9</sup> Pemerintah pusat tidak lagi “given” dan “uniform” (menerima dan seragam), tetapi pemerintah daerah harus berinisiatif merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosial budaya masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Dalam UU No. 12 tahun 2008 disebutkan bahwa untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil. Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat “block grant”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan Dana Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>11</sup> Selain dana perimbangan, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri, antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>12</sup> Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adriani dan Yasa (2015), mengatakan: “Semakin besar pendapatan asli daerah maka belanja daerah akan semakin meningkat, dan semakin banyak belanja yang akan dibelanjakan untuk kesejahteraan masyarakat.”<sup>13</sup> Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2011) menunjukkan: “Semakin kuat kemampuan daerah dalam menghimpun PAD maka semakin longgar distribusi belanja daerah, sehingga terdapat korelasi positif antara PAD dengan belanja daerah.”<sup>14</sup> Peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan belanja daerah juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan infrastruktur dan pembangunan daerah, pajak dan retribusi daerah telah dikembalikan kepada masyarakat.<sup>15</sup> Penelitian Abdullah dan Halim (2003) menunjukkan bahwa belanja daerah sebagian besar dipengaruhi oleh pembayaran transfer pemerintah pusat.<sup>16</sup> Dana alokasi umum merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk menghimpun dana belanja daerah, karena tidak semua beban belanja daerah dapat dibayar penuh oleh pendapatan daerah. Peranan dana alokasi umum adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. berdasarkan potensi fiskal.<sup>17</sup>

Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD menjelaskan langkah-langkah spesifik untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pertanian, industri dan pariwisata, pelayanan publik di bidang pendidikan

<sup>9</sup>Suyanto, “Flypaper effect theory dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal”, jurnal ekonomi pembangunan Vol. 11 No. 1, h.70

<sup>10</sup>Rahmawati, Luluk Atika dan Bambang Suyono, “Flypaper effect dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah”, jurnal ilmu dan riset akuntansi, Vol.4, No.9, h.2

<sup>11</sup>Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Edisi 4, Salemba 4 : Jakarta, 2014), h. 17.

<sup>12</sup>Mardiasmo, “Perpajakan Edisi Revisi” (Yogyakarta: Andi, 2011), h.1.

<sup>13</sup>Adriani & Yasa, “Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali”, E-Jurnal EP Unud. Vol.4 No.11 : 1328-1356.

<sup>14</sup>Hadi Sasana, “Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal”, Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), Vol. 18, No.1 : 46-58.

<sup>15</sup>Zolla Maretia Putri, *Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, E-Issn: 2460-0585, h.8.

<sup>16</sup>S. Abdullah & A. Halim, “Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten / Kota Di Jawa Dan Bali”, Sposium Nasional Akuntansi V1, 1140-1159.

<sup>17</sup>Irma Dwi April Rianti, *Pengaruh Flypaper Effect Pada Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur)*, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, E-ISSN : 2460-0585, h.17.

dan kesehatan, serta reformasi birokrasi. Hal tersebut menjadi prioritas dalam percepatan pembangunan Provinsi Lampung dan mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam NAWACITA (9 program pembangunan nasional), sehingga pembangunan dapat berjalan sinergi dan penuh koordinasi. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) Kabupaten / Kota yaitu Kabupaten Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung timur, Lampung Selatan, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Metro.<sup>18</sup>

Pada tahun 2019 pendapatan Provinsi Lampung (agregat) dalam APBD diperkirakan sebesar Rp31,313 triliun atau naik 10,6 persen dibanding tahun 2018. PAD diperkirakan sebesar Rp5,506 triliun atau naik sebesar 5,6 persen dibanding tahun 2018. Dana Perimbangan diperkirakan Rp20,205 triliun atau naik 8,60 persen dibanding tahun 2018. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan Rp5,6 triliun atau naik 25,1 persen. Namun demikian, pada tahun 2019 pendapatan daerah masih didominasi oleh penerimaan Dana Perimbangan dengan porsi 64,5 persen dari total pendapatan.

**Tabel 1**  
**Profil APBD Provinsi Lampung Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, 2018 – 2019**

Uraian	Target		Realisasi	
	2018	2019	2018	2019
<b>PAD</b>	<b>5,859,851,926,703</b>	<b>5,506,964,933,291</b>	<b>4,529,267,403,820</b>	<b>4,976,114,973,080</b>
Pajak Daerah	4,090,912,994,823	3,819,747,830,352	3,440,625,241,442	3,575,317,793,147
Retribusi Daerah	138,420,126,816	175,196,435,076	91,844,351,520	102,912,331,810
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	95,173,919,870	107,847,477,612	89,439,340,664	98,705,094,468
Lain-lain PAD Yang Sah	1,535,344,885,193	1,404,173,190,251	907,358,470,194	1,199,179,753,655
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>20,075,585,850,454</b>	<b>20,205,779,268,058</b>	<b>17,768,774,271,777</b>	<b>18,402,032,751,784</b>
DBH	938,839,316,971	1,372,579,402,892	721,063,690,665	1,095,214,112,761
DAU	12,891,526,399,000	12,899,602,285,000	11,421,006,655,160	12,119,576,396,000
DAK	6,245,220,134,483	5,933,597,580,166	5,626,703,925,952	5,187,242,243,023
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>4,945,849,790,195</b>	<b>5,600,268,728,436</b>	<b>3,651,630,261,627</b>	<b>4,608,329,833,899</b>
<b>Jumlah</b>	<b>30,881,287,567,352</b>	<b>31,313,012,929,785</b>	<b>25,949,671,937,224</b>	<b>27,986,477,558,763</b>

Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung 2019

Sedangkan dari sisi belanja, pada tahun 2019 belanja dianggarkan sebesar Rp32,279 triliun atau naik 8,5 persen. Belanja daerah masih didominasi untuk belanja operasional/konsumsi yaitu sebesar Rp26,621 triliun atau sekitar 82,5 persen dari total belanja APBD. Sedangkan untuk modal hanya sebesar Rp5,657 triliun atau sekitar 17,5 persen dari total belanja APBD. Dengan komposisi APBD seperti tersebut diatas maka akan terjadi defisit sebesar Rp966,081 miliar. Defisit tersebut akan ditutup dengan pembiayaan sebesar Rp809,239 miliar sehingga terjadi SiLPA minus sebesar Rp156,841 miliar.

Dana transfer ke daerah merupakan bagian belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Dana perimbangan meliputi DBH, DAU dan DAK. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, Kontribusi Dana Perimbangan (agregat) masih diatas 60 persen sedangkan penerimaan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah kontribusinya masih dibawah 20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendanaan APBD masih sangat bergantung dengan penerimaan Dana Perimbangan. Untuk

<sup>18</sup>Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung, “Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2019”, (Bandar Lampung, CV. Jaya Wijaya), h.13.

mengetahui kontribusi belanja daerah terhadap komponen pendapatan daerah dalam APBD perlu dilakukan analisis ruang fiskal dan kemandirian daerah.<sup>19</sup>

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Belanja daerah diklasifikasi menjadi 2 (dua) yaitu belanja daerah berdasarkan klasifikasi urusan dan ekonomi. Sumber pendanaan belanja daerah berasal dari PAD, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya yang sah.

**Tabel 2**  
**Belanja APBD menurut klasifikasi di Provinsi Lampung 2018-2019**

No	APBD Berdasarkan Fungsi & Urusan	2018	2019	% Total Belanja	
				2018	2019
<b>01</b>	<b>PELAYANAN UMUM</b>	<b>10,551,939,107,746</b>	<b>11,289,217,650,675</b>	<b>34.7%</b>	<b>36.57%</b>
	Kearsipan	18,308,857,332	5,946,039,461	0.1%	0.02%
	Kepegawaian	161,105,879,151	194,610,166,433	0.5%	0.63%
	Keuangan	6,866,324,720,440	7,316,839,573,441	22.6%	23.70%
	Komunikasi dan Informatika	144,728,928,373	155,767,450,132	0.5%	0.50%
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dll	3,061,346,922,492	3,290,688,061,434	10.1%	10.66%
	Pengawasan	112,570,767,045	103,188,979,452	0.4%	0.33%
	Perencanaan	181,568,055,963	204,712,415,478	0.6%	0.66%
	Persandian	2,536,056,250	11,473,159,528	0.0%	0.04%
	Statistik	3,448,920,700	5,991,805,317	0.0%	0.02%
<b>02</b>	<b>KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	<b>339,125,545,547</b>	<b>357,942,477,222</b>	<b>1.1%</b>	<b>1.16%</b>
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	41,584,340,398	26,674,143,247	0.1%	0.09%
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Linmas	297,541,205,149	331,268,333,975	1.0%	1.07%
<b>03</b>	<b>EKONOMI</b>	<b>1,443,010,333,291</b>	<b>1,495,518,027,868</b>	<b>4.7%</b>	<b>4.84%</b>
	Energi dan Sumberdaya Mineral	35,975,415,000	33,215,508,836	0.1%	0.11%
	Kehutanan	87,502,762,602	82,382,847,606	0.3%	0.27%
	Kelautan dan Perikanan	105,994,350,255	109,743,904,387	0.3%	0.36%
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	72,586,912,317	85,433,593,008	0.2%	0.28%
	Pangan	58,680,866,762	77,834,371,359	0.2%	0.25%
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	103,470,845,436	99,550,108,885	0.3%	0.32%
	Penanaman Modal	83,525,907,711	99,028,636,577	0.3%	0.32%
	Perdagangan	138,782,708,162	138,447,576,194	0.5%	0.45%
	Perhubungan	150,415,781,560	130,574,793,691	0.5%	0.42%
	Perindustrian	44,096,063,503	52,991,249,183	0.1%	0.17%
	Pertanian	480,476,283,841	501,467,624,188	1.6%	1.62%
	Tenaga Kerja	76,679,982,042	79,223,235,107	0.3%	0.26%
	Transmigrasi	4,822,454,100	5,624,578,846	0.0%	0.02%
<b>04</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>218,372,059,568</b>	<b>263,580,517,745</b>	<b>0.7%</b>	<b>0.85%</b>
	Lingkungan Hidup	207,977,203,068	225,569,623,067	0.7%	0.73%
	Pertanahan	10,394,856,500	38,010,894,678	0.0%	0.12%
<b>05</b>	<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>	<b>6,180,256,594,848</b>	<b>4,741,583,401,629</b>	<b>20.3%</b>	<b>15.36%</b>
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5,577,862,459,174	4,226,398,932,645	18.3%	13.69%
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	602,394,135,674	515,184,468,984	2.0%	1.67%
<b>06</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>3,281,852,190,657</b>	<b>3,545,089,617,606</b>	<b>10.8%</b>	<b>11.48%</b>
	Kesehatan	3,140,166,782,895	3,386,441,449,540	10.3%	10.97%
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	141,685,407,762	158,648,168,066	0.5%	0.51%
<b>07</b>	<b>PARIWISATA</b>	<b>131,396,921,076</b>	<b>151,165,617,220</b>	<b>0.4%</b>	<b>0.49%</b>
	Kebudayaan	33,311,985,229	39,324,086,752	0.1%	0.13%
	Pariwisata	98,084,935,847	111,841,530,468	0.3%	0.36%

<sup>19</sup>Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral pembendaharaan Provinsi Lampung, "Kajian Fisikal Regional Tahun 2019", h.55-56.

<b>08</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>7,973,924,247,359</b>	<b>8,683,496,976,288</b>	<b>26.2%</b>	<b>28.13%</b>
	Kepemudaan dan Olah Raga	73,672,168,546	106,500,609,637	0.2%	0.35%
	Pendidikan	7,827,061,744,242	8,441,122,626,403	25.7%	27.35%
	Pendidikan dan Pelatihan	533,703,457	51,236,429,059	0.0%	0.17%
	Penelitian dan Pengembangan	31,066,813,345	19,172,330,321	0.1%	0.06%
	Perpustakaan	41,589,817,769	65,464,980,868	0.1%	0.21%
<b>09</b>	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	<b>305,475,870,969</b>	<b>340,015,744,714</b>	<b>1.0%</b>	<b>1.10%</b>
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	118,360,181,971	119,327,715,743	0.4%	0.39%
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	59,049,653,485	62,039,860,905	0.2%	0.20%
	Sosial	128,066,035,513	158,648,168,066	0.4%	0.51%
<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>30,425,352,871,061</b>	<b>30,867,610,030,967</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.00%</b>

Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung 2019

Menurut klasifikasinya, belanja daerah terdiri dari klasifikasi fungsi dan urusan. Klasifikasi urusan terdiri dari 40 (empat puluh) jenis sedangkan berdasarkan urusan terdiri dari 9 (sembilan) urusan. Pada tahun 2019, alokasi anggaran tertinggi (urusan) adalah Pelayanan Umum sebesar 36,57 persen dari total anggaran (agregat). Alokasi untuk urusan Pendidikan sebesar 28,13 persen, urusan Kesehatan sebesar 11,48 persen, urusan Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 15,36 persen dan urusan Ekonomi sebesar 4,84 persen. Berdasarkan rincian alokasi tersebut, anggaran belanja berorientasi pada pelayanan umum. Alokasi anggaran untuk urusan Pendidikan sebesar 28,13 persen dan urusan Kesehatan sebesar 11,48 persen. Alokasi untuk kedua urusan tersebut telah memenuhi amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 (urusan pendidikan) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 (urusan kesehatan). Untuk urusan ekonomi, alokasi anggarannya baru 4,84 persen. Pertanian sebagai sektor andalan di Lampung mendapat alokasi sebesar 1,62 persen sedangkan alokasi sektor lainnya dalam kelompok urusan ekonomi hanya mendapat alokasi dibawah 1 persen. Padahal sektor pertanian Lampung memiliki potensi besar menjadi percontohan bagi daerah lain. Selain itu, Lampung juga memiliki peran besar di sektor pertanian dan peternakan nasional khususnya sektor agro seperti singkong, sawit, lada, kopi, beras dan udang. Alokasi anggaran untuk urusan Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 15,36 persen dengan rincian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 13,69 persen dan Perumahan Rakyat dan Permukiman sebesar 1,67 persen. Alokasi ini digunakan untuk belanja infrastruktur daerah yang terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan umum dan ekonomi dalam rangka menyerap tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik.<sup>20</sup>

Negara yang berlandaskan prinsip Islam memiliki tujuan besar, yaitu memenuhi kebutuhan hidup semua orang, memerangi ketidakadilan antara pemerintah dan anggota masyarakat, serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Semua tujuan tersebut harus dicapai atas dasar keadilan untuk mencapai tujuan tersebut, negara berhak mengatur anggaran dan belanja pemerintah.<sup>21</sup> Dalam hukum Islam, anggaran belanja harus digunakan untuk kepentingan prioritas, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimum, pertahanan negara, penegakan hukum, kegiatan Islam, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, penegakan peradilan, administrasi publik, dan pelayanan sosial lainnya yang bersifat swasta yang sektor dan pasar tidak dapat menyediakan. Oleh karena itu, ketika suatu negara beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka semua kegiatan bangsa harus taat dan berpegang pada ketentuan ajaran Islam.<sup>22</sup> Untuk mengalokasikan sumber daya dan kekayaan, negara dapat secara langsung melakukan intervensi secara langsung atau melalui intervensi regulasi. Bentuk intervensi langsung meliputi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dari sisi belanja negara, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya melalui pembangunan infrastruktur yang layak sehingga semua daerah dapat menikmatinya secara adil.<sup>23</sup>

<sup>20</sup>Ibid, h.61-63.

<sup>21</sup>Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami*, (Jakarta:kencana, 2016),h.73.

<sup>22</sup>Ibid, h.76.

<sup>23</sup>Ibid, h. 65.



Negara harus mendistribusikan pendapatan atau kekayaan Negara dengan secara adil dan merata kesemua kalangan masyarakat. Keadilan dilakukan dengan memberlakukan kebaikan bagi semua manusia dalam kondisi apapun. Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam islam adalah adanya kesempatan semua anggota masyarakat apapun ras agama, dan karakternya untuk mendapatkan kecukupan bukan kekurangan. Negara harus mendistribusikan pendapatan atau kekayaan negara secara adil dan merata kepada semua sektor masyarakat. Keadilan dicapai dengan memberikan kebaikan kepada semua dalam keadaan apapun. Tujuan pertumbuhan ekonomi Islam adalah untuk memberikan kesempatan kepada semua anggota masyarakat, tanpa memandang ras, agama, dan karakternya, untuk menjadi mandiri.<sup>24</sup> Masyarakat membutuhkan pelayanan dan tatanan kehidupan yang dapat menghasilkan kegiatan ekonomi, meningkatkan semangat hidup, dan memberikan kemampuan untuk menciptakan keindahan dan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>25</sup>

Jumlah kebutuhan belanja daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya membuat beberapa pemerintah provinsi tidak dapat sepenuhnya mengandalkan PAD. Pada akhirnya, selain menggunakan PAD, dana transfer dalam bentuk DAU juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Seiring dengan hal tersebut munculah masalah yang masih sering timbul mengenai dana alokasi umum ini yaitu tentang pemahaman pemerintah pusat dan daerah yang berbeda tentang fungsinya.<sup>26</sup>

Fenomena ini disebut "Flypaper Effect". Flypaper Effect terjadi ketika pemerintah daerah lebih fokus menggunakan dana transfer daripada menggunakan dana mereka sendiri berupa PAD untuk memenuhi kebutuhan belanja. Hal ini mengakibatkan PAD tidak berdampak signifikan terhadap belanja daerah, atau dampak transfer dana terhadap belanja daerah lebih besar daripada dampak PAD terhadap belanja daerah. Fenomena flypaper effect memiliki arti yang lebih luas yaitu pembayaran transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar dari pendapatan transfer itu sendiri. Akibatnya, pemerintah daerah meminta pemerintah pusat memberikan pembayaran transfer yang lebih besar setiap tahun.<sup>27</sup>

Penelitian terkait *flypaper effect* telah dilakukan diberbagai daerah di Indonesia. (Wakhid & Muthmainah, 2018) menyatakan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat diterima, artinya besarnya nilai DAU, DAK, DBH dan PAD secara simultan ataupun parsial berpengaruh positif terhadap besarnya nilai Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra tahun 2012-2016. Dari keempat variabel independen, DAU memiliki pengaruh yang paling besar dalam pengeluaran belanja daerah, sedangkan DBH memiliki pengaruh paling kecil. Kedua, hasil pengujian dari hipotesis kelima membuktikan bahwa fenomena *Flypaper Effect* masih terjadi pada Kabupaten/ Kota di Pulau Bali dan Nusra yang memiliki karakteristik unggulan pada sektor pariwisata ini.<sup>28</sup> (Yohanis Tuaputimain, 2019) Dari hasil penelitian ini diketahui pada realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 sampai tahun anggaran 2017, pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Maluku secara rata-rata lebih kecil dari dana alokasi umum terhadap belanja daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.<sup>29</sup> Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan penerapan desentralisasi melalui otonomi daerah. Daerah diharapkan dapat menumbuhkan

---

<sup>24</sup>Abdullah Abdul Husain Attariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), h.303.

<sup>25</sup>*Ibid.* h.66.

<sup>26</sup>Syahriar Abdullah dan Listia Riani, Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat, JURNAL WIDYA GANECWARA, Vol.10 No.4, ISSN 2723-7125, Oktober, 2020. h.2.

<sup>27</sup>Ardiansyah, Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia, Volume 2, No.2, H.1-3, (April 2019).

<sup>28</sup>Wakhid Ansori & Muthmainah, "Fenomena Flypaper Effect Atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Bali Dan Nusra", Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol.18 No.2 (Agustus 2018).

<sup>29</sup>Yohanis Tuaputimain, "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah", Jurnal Akuntansi, vol.2 No.2 (Oktober 2019).

kemandiriannya dalam menggali potensi penerimaan daerahnya. Permasalahan yang sering dirasakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sumber dana pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber PAD yang belum optimal terutama yang berasal pajak daerah dan retribusi daerah dan pemerintah daerah terlalu berlebihan atau terlalu mengandalkan penggunaan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerah sehingga tidak adanya kemandirian pemerintah daerah dalam hal finansial, sementara optimalisasi potensi yang dimiliki daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Pasalnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki perbedaan pemahaman tentang fungsi DAU, pemerintah pusat akan mentransfer dana untuk dana perimbangan antar daerah. Pada saat yang sama, pemerintah daerah memahami transfer dana yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan daerah.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Fenomena *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

### C. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat "block grant", sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan Dana Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>31</sup> Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>32</sup> belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>33</sup> *Flypaper effect* atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD.<sup>34</sup> Oleh karena itu, agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

1. Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu DAU dan PAD, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah.
2. Penelitian ini menggunakan data dalam kurun waktu 2016 –2019 pada setiap variabel independen dan dependen.

### D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2019 ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2019 ?

<sup>30</sup> Indah Ningsih, Anik Malikah, Dan Siti Aminah Anwar, Analisis *Flypaper Effect* Dari Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd ) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019, E-Jra Vol. 10 No. 01 Februari 2021, H.59.

<sup>31</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Edisi 4, Salemba 4 : Jakarta, 2014), h. 17.

<sup>32</sup> Mardiasmo, "*Perpajakan Edisi Revisi*" (Yogyakarta: Andi, 2011), h.1.

<sup>33</sup> Fadillah Amin, "Penganggaran Di Pemerintahan Daerah" (Malang : UB Press , 2019), h.18.

<sup>34</sup> Mutiara Maimunah, *Flypaper Effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi*. Padang. 23 – 26 Agustus 2006, h.9.

3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016 – 2019 ?
4. Apakah terjadi *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016-2019?
5. Bagaimanakah Pandangan Ekonomi Islam mengenai Belanja Daerah?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung 2016 – 2019.
2. Untuk Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Lampung 2016 – 2019.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016 – 2019.
4. Untuk Mengetahui terjadi atau tidaknya *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016-2019.
5. Untuk Menganalisis Bagaimana Belanja Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

#### **F. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi dan pengetahuan bagi pihak lain yang berkepentingan.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan hasil penelitian sebelumnya, dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang, serta dapat juga dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa atau peneliti lainnya (khususnya pada masyarakat luas).

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Akademisi**

Penelitian ini akan menambah khasanah pengetahuan tentang Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah, serta mampu menjadi salah satu masukan bagi penelitian yang akan datang.

###### **b. Bagi Pemerintah**

Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta menentukan arah dan strategi peningkatan kemandirian keuangan daerah Indonesia dan diharapkan pula hasil kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan gambaran bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta menentukan arah dan strategi peningkatan kemandirian keuangan Provinsi Lampung.

###### **c. Bagi Penulis**

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman lebih mendalam lagi mengenai ilmu ekonomi pembangunan dalam perspektif Ekonomi Islam.

#### **G. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN**

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu itu sendiri. Dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan *Flypaper Effect* yang merupakan objek dalam penelitian ini. Sehingga hasil dari penelitian tersebut akan menjadi salah satu bahan referensi serta acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan :



1. Penelitian ini dilakukan oleh Esra Erikson Sihombing, SE & Anthonius H Citra Wijaya, M.Sc,Ak,CA, jurnal, dengan judul “*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Papua”, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena *flypaper effect* dengan cara menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah, Metode statistik yang digunakan adalah statistik inferensial dengan analisis regresi sederhana dan berganda menggunakan perangkat SPSS (*Statistic Product and Service Solution*), Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi *flypaper effect*, sesuai dengan syarat bahwa nilai koefisien Dana Alokasi Umum lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah.<sup>35</sup>
2. Penelitian ini dilakukan oleh Ishak. KS, Rudy Arafah, dan Hasnah M, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, dengan judul “*Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kota Parepare”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Flypaper Effect* terhadap dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Untuk mengetahui nilai dari variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, dimana variabel dalam penelitian adalah pendapatan daerah yang bersumber dari belanja daerah berdasarkan PAD dan DAU. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kota Parepare periode 2014-2018. *Flypaper Effect* terjadi karena Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum digunakan lebih dulu untuk Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Daerah Kota Parepare karena lebih didominasi oleh Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutupi Belanja Daerahnya.<sup>36</sup>
3. Penelitian ini dilakukan oleh Elfira Rahma Dayanti, Arman Delis, dan Emilia, e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, dengan judul “*Flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi”, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah, serta untuk mendeteksi terjadinya *flypaper effect*. Penelitian ini juga menganalisis kontribusi dan pertumbuhan PAD, serta peran Dana Perimbangan dalam membiayai Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi dan pertumbuhan PAD masih tergolong rendah, sedangkan dana perimbangan memiliki kontribusi yang tinggi dalam membiayai belanja daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan DAU, DBH, dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Namun secara parsial, hanya DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan, sedangkan DBH tidak mempunyai

---

<sup>35</sup>Esra Erikson Sihombing & Anthonius H Citra Wijaya, “*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Papua”, *jurnal akuntansi dan keuangan daerah*, Vol.11 No.1 (Mei 2016).

<sup>36</sup> Ishak. KS, Rudy Arafah, dan Hasnah M, “*Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kota Parepare”, *jurnal ekonomi dan bisnis*, Vol.2 No.2 (Agustus 2019).

pengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Selanjutnya, tidak terjadi flypaper effect pada belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.<sup>37</sup>

4. Penelitian ini dilakukan oleh Nurhayati dan Diana Septiana, media ekonomi vol.1 26, no. 2, dengan judul *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatra, Dalam pemilihan model terbaik menggunakan alat analisis Regresi Linier Berganda data panel, Hasil penelitian ini menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatra. Selain itu hasil pengujian ini menyimpulkan terdapat *flypaper effect* pada realisasi APBD di seluruh Pemerintah Provinsi di pulau Sumatra, hal ini disimpulkan berdasarkan hasil pengujian dimana nilai koefisien beta variabel PAD yang lebih kecil dibandingkan.<sup>38</sup>
5. Penelitian ini dilakukan oleh Woro Tiyas Pradipta dan Bambang Jatmiko. Dengan judul Pengaruh Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2014 -2016), Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 2 No. 2, Hlm: 171-185, Desember 2018, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan efek flypaper terhadap pengeluaran lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi fakta yang sistematis, faktual, dan akurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pengeluaran daerah. Tetapi DAU dan PDRB tidak berpengaruh pada pengeluaran lokal. Pengaruh PAD terhadap pengeluaran lokal lebih besar dari pada pengaruh DAU, DAK, dan DBH secara simultan terhadap pengeluaran lokal, sehingga tidak ada fenomena efek flypaper di Provinsi Indonesia pada periode 2014-2016. Ini menunjukkan bahwa Ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi mandiri dalam keuangannya dengan tidak bergantung pada pemerintah pusat.<sup>39</sup>
6. Penelitian ini dilakukan oleh Shita Unjaswati Ekawarna, dengan judul Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi), Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 3, Januari – Maret 2017 ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 (online), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kemampuan keuangan daerah antara kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Jambi dan untuk mengetahui apakah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah serta untuk mendeteksi terjadinya flypaper effect. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi dan komposisi sumber-sumber PAD terhadap penerimaan PAD, baik pada daerah induk maupun pada daerah pemekaran masih tergolong rendah. Namun daerah induk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menggali sumber-sumber PAD dibandingkan dengan daerah pemekaran. Dana perimbangan memiliki kontribusi yang tinggi dalam membiayai belanja daerah pada daerah induk dan daerah pemekaran. Alokasi belanja daerah pada daerah induk dan daerah

---

<sup>37</sup>Elfira Rahma Dayanti, Arman Delis, dan Emilia, "Flypaper effect pada belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi", *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol.7 No.3 (Desember 2018).

<sup>38</sup>Nurhayati dan Diana Septiana, "Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatra", media ekonomi vol.1 26, no. 2 (Oktober 2018).

<sup>39</sup>Woro Tiyas Pradipta dan Bambang Jatmiko, "Pengaruh Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2014 -2016)", Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 2 No. 2, Hlm: 171-185, Desember 2018.

pemekaran mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun sebagian besar anggaran belanja daerah masih dialokasikan untuk belanja operasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa pada daerah induk dan pemekaran, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap variabel Belanja Daerah. Namun secara parsial, variabel PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan variabel DBH dan DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Tidak terjadi flypaper effect pada daerah induk dan pemekaran di Provinsi Jambi.<sup>40</sup>

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- |                |   |
|----------------|---|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b><br>Merupakan uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan skripsi. |
| <b>BAB II</b>  | <b>LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS</b><br>Menyajikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi landasan teori dan pengajuan hipotesis serta kerangka pemikiran.  |
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PENELITIAN</b><br>Merupakan uraian tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian, penentuan populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel serta teknik pengolahan dan analisis data.                       |
| <b>BAB IV</b>  | <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b><br>Terdiri dari deskripsi objek penelitian serta pembahasan hasil penelitian dan analisis.   |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b><br>Terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.  |

---

<sup>40</sup>Shita Unjaswati Ekawarna, "Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi), Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 3, Januari – Maret 2017 ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 (online).

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen, Meckling, dan Eisenhardt (dalam buku Narhatyo & Utami, 2019) menyatakan bahwa teori keagenan berfokus pada hubungan kontraktual antara prinsipal (sipemberi amanah), dengan agen (si pemegang amanah). Amanah tersebut dijalankan oleh agen untuk dan atas kepentingan prinsipal.<sup>41</sup>

Dalam konteks penganggaran publik, pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen dalam penyaluran dana perimbangan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur daerah mereka sendiri. Akibat dari kebijakan tersebut, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Dana perimbangan inilah yang akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah (agen) kepada pemerintah pusat (prinsipal).<sup>42</sup> Meskipun diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, pengelolaan keuangan merupakan salah satu mandat dari rakyat karena uang yang dimiliki pemerintah baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah seluruhnya adalah uang milik rakyat yang penggunaannya harus sampai untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu penggunaannya hibah dari pemerintah pusat harus dialokasikan untuk sektor-sektor yang mengutamakan kepentingan publik yang dapat meningkatkan pemasukan bagi daerah. Rakyat dalam hal ini sebagai *principal* memiliki DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah agar segala kebijakan yang diambil pemerintah dapat mengutamakan kepentingan rakyat. Disitulah peran teori agensi dalam menjelaskan hubungan keagenan pada penganggaran sektor publik.<sup>43</sup>

#### B. Dana Alokasi Umum

##### 1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. Termasuk didalam pengertian pemerataan kemampuan keuangan daerah adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada Daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.<sup>44</sup> Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat "block grant", sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan Dana Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup>Nahartyo, E., & Utami, I. *Panduan Praktis Riset Eksperimen*. (Jakarta Barat: Penerbit Indeks Jakarta, 2019), h.73-75.

<sup>42</sup>Haris Fadilah Dan Nayang Helmayunita, "Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia", Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No 3, Seri C, Agustus 2020, h. 3146.

<sup>43</sup>Winda Putri Lestari, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol6 No.6 Juni 2017), h.3.

<sup>44</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h.110.

<sup>45</sup>Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Edisi 4, Salemba 4 : Jakarta, 2014), h. 17.

Dana Alokasi Umum pada kelompok dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.<sup>46</sup>

Secara definisi, Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
- b. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
- c. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralkan ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil SDA yang diperoleh daerah.<sup>47</sup>

## 2. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)

Besarnya dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Yang dimaksudkan dengan Penerimaan Dalam Negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

DAU ini merupakan seluruh alokasi umum untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kenaikan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah dan pengalihan kewenangan pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari, sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum yaitu sebagai berikut :

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam APBN.
3. Dana Alokasi Umum untuk suatu Daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk seluruh Daerah Provinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi daerah provinsi yang bersangkutan. Porsi Daerah Provinsi ini merupakan proporsi bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi diseluruh Indonesia.<sup>48</sup>

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima Dana Alokasi umum sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negative tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima dana alokasi umum sebesar alokasi dasar setelah dikurangi

<sup>46</sup>Rudy Badrudin. "Ekonomiika Otonomi Daerah" (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2012), h. 54.

<sup>47</sup>Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada, 2014), h.63.

<sup>48</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h.110-113.

nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima dana alokasi umum.<sup>49</sup>

## C. Pendapatan Asli Daerah

### 1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>50</sup> Pendapatan asli daerah merupakan hasil yang diperoleh dari penggabungan penerimaan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan pada wilayah tersebut dan dari hasil lain yang menurut hukum sah di Indonesia.<sup>51</sup>

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain : “Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan faktor keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”. Definisi ini dikemukakan oleh pemuji yang dikutip oleh Riwo Kaho.<sup>52</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>53</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.<sup>54</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>55</sup>

### 2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:<sup>56</sup>

<sup>49</sup>Rudy Badrudin. “*Ekonomi Otonomi Daerah*” (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2012), h. 55.

<sup>50</sup>Mardiasmo, “*Perpajakan Edisi Revisi*” (Yogyakarta: Andi, 2011), h.1.

<sup>51</sup>Hanif Nurcholis, “*Teori dan praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*” (Grasindo, Jakarta, 2007), 182.

<sup>52</sup>Josef Riwo Kaho, “*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia :Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*” (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2005) h.78.

<sup>53</sup>Rudy Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2011.H.99.

<sup>54</sup>Abdul Halim, “*Analisis Investasi*” (Jakarta:Salemba Empat, Edisi kedua, 2011), h.101.

<sup>55</sup>Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011,h.382

<sup>56</sup>Yuliati, “*Akutansi sektor public*” (Jakarta, Salemba empat, cet-kelima, 2000), h.97.



## 1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>57</sup> Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>58</sup> Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu :<sup>59</sup>

- a. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari :
  1. Pajak Kendaraan Bermotor
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- b. Pajak Daerah Kabupaten / Kota yang terdiri dari :
  1. Pajak Hotel dan Restoran
  2. Pajak Hiburan
  3. Pajak Reklame
  4. Pajak Penerangan Jalan
  5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
  6. Pajak Parkir

## 2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.<sup>60</sup> Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>61</sup> Retribusi Daerah dapat dibagi dalam berbagai kelompok, antara lain .<sup>62</sup>

### a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan retribusi atas sebuah jasa yang sudah di siapkan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk retribusi tersebut dapat dimanfaatkan oleh umum maupun pribadi. adapun jenis-jenis retribusi jasa umum Retribusi layanan kesehatan, Retribusi Kebersihan, Retribusi penggantian biaya cetak KTP, Retribusi pelayanan pemakaman, Retribusi pelayanan pasar, Retribusi pengujian kapal perikanan.

### b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa khusus merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip komersial pada dasarnya juga dapat disediakan oleh pihak swasta. Ada beberapa jenis dari retribusi jasa khusus yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/ pertokoan, retribusi tempat pelelangan terminal,

<sup>57</sup>Sjafrizal, *“Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi”*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h.393

<sup>58</sup>Mardiasmo, *“Perpajakan”* (Yogyakarta : Penerbit Andi, Edisi Revisi, 2011), h.12.

<sup>59</sup>UU Nomor 34 Tahun 2000

<sup>60</sup>Rahardja adisasmita, *“Pembiayaan Pembangunan Daerah”* (Yogyakarta: Graha,2011), h.90

<sup>61</sup>Mardiasmo, *“Perpajakan”* (Yogyakarta : Penerbit Andi, Edisi Revisi, 2011), h.15.

<sup>62</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia* ,(Jakarta : Rajawali pers,2013),h.64-71.

retribusi tempat parkir khusus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pengolahan limbah cair.

### **c. Retribusi Perizinan Tertentu**

Merupakan Suatu Kegiatan Pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian maupun pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, barang, prasarana, tertentu untuk melindungi kelestarian lingkungan. Adapun jenis-jenis dari Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, maupun Retribusi izin gangguan trayek.

## **3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Salah satu sebab berlakunya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda dalam pemerintah daerah. Termasuk didalamnya terdapat berupa sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah, maka sewaktu nya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi daerah, sehingga dapat memperkembangkan perekonomian daerah.

## **4. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dibeberapa daerah, Misalnya di dapatkan dari beberapa sumber sebagai berikut : Hasil penjualan barang milik daerah ; jasa giro ; sumbangan pihak ketiga ; penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah dan juga setoran ketika denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah.<sup>63</sup> Lain-lain pendapatan yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah, pinjaman kepada masyarakat, dan juga dengan menerbitkan obligasi daerah.

## **3. Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>64</sup>

## **D. Belanja Daerah**

### **1. Pengertian Belanja Daerah**

Halim (2002) dengan mengutip dari IASC Framework menjelaskan bahwa biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berakitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. Sedangkan menurut Undang – Undang Replubik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>65</sup>

<sup>63</sup>Ibid, h.74.

<sup>64</sup>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3

<sup>65</sup>Fadillah Amin, “Penggangan Di Pemerintahan Daerah” (Malang : UB Press , 2019), h.18.

## 2. Tujuan Belanja Daerah

Berdasarkan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tentang Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tujuan dari belanja daerah dapat di klasifikasi antara lain sebagai berikut :

- a. Merupakan rasionalisasi atau gambaran kemampuan dan penggunaan sumber – sumber finansial dan material yang tersedia pada suatu negara / daerah.
- b. Sebagai upaya untuk penyempurnaan berbagai rencana kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga hasilnya akan lebih baik.
- c. Sebagai landasan yuridis formal dari penggunaan sumber penerimaan yang dapat dilakukan pemerintah serta sebagai alat untuk pembatasan pengeluaran.
- d. Sebagai alat untuk menampung, menganalisis, serta mempertimbangkan dalam membuat keputusan seberapa besar alokasi pembayaran program dan proyek yang dilakukan.<sup>66</sup>

## 3. Klasifikasi Belanja Daerah

Klasifikasi belanja daerah pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa klasifikasi belanja pemerintah daerah meliputi :

- a. Klasifikasi belanja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan / atau kabupaten / kota yang terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- b. Klasifikasi belanja menurut fungsi bertujuan untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut klasifikasi ini, belanja terdiri atas pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial. Berbeda dengan Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tidak memasukan fungsi pertahanan dan agama karena kedua fungsi tersebut adalah urusan pemerintah yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan tidak didesentralisasikan.
- c. Klasifikasi menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengklasifikasian belanja ini berdasarkan kriteria apakah suatu belanja mempunyai kaitan langsung dengan program / kegiatan atau tidak. Belanja yang berkaitan langsung dengan program / kegiatan (misalnya belanja honorarium, belanja barang, belanja modal) diklasifikasikan sebagai belanja Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Langsung, sedangkan belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan program / kegiatan (misalnya gaji dan tunjangan pegawai bulanan, belanja bunga, donasi, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan sebagainya) diklasifikasikan sebagai belanja tidak langsung.<sup>67</sup>

## 4. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Disisi lain, semakin besar pendapatan yang dihasilkan dari pajak-

---

<sup>66</sup>Ibid, h.20.

<sup>67</sup>Ibid, h.21-22.

pajak dan retribusi atau penerimaan yang bersumber dari masyarakat, maka akan mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian (terjadi kontraksi perekonomian). Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka sebagaimana diarahkan oleh Kementerian Keuangan RI (2017), pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized), terdevaluasi (devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta pembungkaman (silencing), sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala / wakil kepala daerah.
- b. Meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan.
- c. Mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja dipedesaan melalui pendekatan program padat karya.
- d. Memberi alokasi anggaran belanja daerah pada sektor pembangunan pedesaan dalam bentuk pemberian bantuan operasional kepada perangkat desa.
- e. Menyediakan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam rangka memberdayakan UMKM.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja daerah dalam pelayanan publik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
- g. Meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerja sama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.<sup>68</sup>

## 5. Pengeluaran Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam pondasi ekonomi islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Secara ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar islami. Tujuan ekonomi islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi masalah bagi seluruh masyarakat. Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan oleh salah satunya tanggung jawab terhadap perekonomian. Tugas pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri dalam islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan islam.

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor Islam berpegang pada terpenuhinya semua pemuasan kebutuhan primer (*basic needs*) tiap-tiap individu dan kebutuhan sekunder (*al hajjat, al kamaliyyah*). *Concern* suatu Negara Islam harus lebih difokuskan kepada pendistribusian ekonomi secara merata. Dengan pendistribusian yang merata akan terjamin keadilan di tengah masyarakat, dan juga tidak akan ada jurang pemisah yang tajam antara si kaya dan miskin. Dengan prinsip

---

<sup>68</sup>Ibid, h.25-26.

keadilan tersebut, akan terjamin kebutuhan primer secara menyeluruh bagi tiap individu rakyat, di samping masing-masing individu akan mampu memenuhi kebutuhan sekundernya.<sup>69</sup>

Pengeluaran dalam negara islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya kebijakan fiskal dalam penjaminan kebutuhan primer, maka negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dan dengan itu terbentuklah suatu karakteristik struktur perekonomian sehingga secara tidak langsung negara telah membuka pintu distribusi ekonomi yang adil.

Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hasr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٧

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa penggunaan fai’ diatur oleh Rasulullah, yaitu sebagai harta rampasan negara yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum. Alokasi pembagiannya berbeda-beda antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lainnya, tergantung kepada kebijakan masing-masing kepala negara dan lembaga yang dipimpinnya. Sudah menjadi kewajiban dan wewenang negara berlaku bijak dan adil dalam mendistribusikan harta terkait kebijakan pengeluaran pemerintah dan pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah yang dalam ajaran agama islam di pandu oleh kaidah-kaidah syariah.

Terdapat beberapa hadis Nabi yang menguatkan beberapa ayat di atas. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “*Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang (diberikan) dari seseorang yang tidak membutuhkan dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.*” Demikian pula al-Hakim meriwayatkan dari Abu al-Ahwash, bahwa Rasulullah bersabda, “*Apabila engkau telah dianugerahi harta oleh Allah, maka hendaknya tanda-tanda nikmat dan kemudian (yang diberikan) Allah kepadamu tersebut ditambahkan.*”

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka sudah menjadi kewajiban dan wewenang negara untuk berlaku bijak dan adil dalam mendistribusikan harta.<sup>70</sup>

Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dapat dibagi dua. Yaitu, karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah di mana distribusi pengeluaran dari penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya: zakat, khumus, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan manusia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan mustahiq. Sementara, pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan.

Muhammad Nejatullah Siddiqi, berpendapat bahwa besar subjek pembelanjaan publik oleh suatu negara yang menerapkan ekonomi Islam tidaklah tetap. Hal ini berkaitan dengan fungsi negara yang bersifat fungsional. Siddiqi menjelaskan karakteristik belanja publik sesuai dengan

<sup>69</sup>Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Al-Qānūn, Vol. 11, No. 2, Desember 2008, h.455.

<sup>70</sup>*Ibid*, h.457.

tiga macam fungsi negara. Pertama, fungsi negara berdasarkan syariah yang bersifat permanen. Kedua, berdasarkan turunan syariah yang ditentukan oleh ijtihad dengan melihat keadaan pada saat itu. Ketiga, fungsi negara pada satu waktu dan keadaan berdasarkan kemauan masyarakat melalui sebuah keputusan syura.<sup>71</sup>

Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah :

- a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor masalah.
- b. Menghindari *mashaqqah* (kesulitan) dan *mudharrat* harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- c. Kaidah *al-ghiyur* bi *al-gunmy*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
- d. Kaidah *ma la yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib*. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi islam dapat dibagi menjadi tiga bagian:<sup>72</sup>

- a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
- b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
- c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. Secara rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada :<sup>73</sup>

1. Prinsip efisiensi dalam belanja rutin. Yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurahmurahnya. Dengan demikian, akan jauh dari sifat mubazir dan kikir, di samping alokasinya harus sesuai syariah
2. Prinsip keadilan. Artinya, tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan.
3. Prinsip komitmen pada syariah dengan skala prioritas dari yang wajib, sunnah, mubah *atau darurat, hajiyyah, dan kamaliyyah*.

Mengenai pengeluaran negara selama masa pemerintahan Rasulullah SAW secara sistematis digunakan untuk hal-hal tertentu dan tersebut di bawah ini dalam tabel berikut :<sup>74</sup>

**Tabel 3**  
**Pengeluaran Pada Pemerintahan Islam**

Primer	Sekunder
➤ Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan	➤ Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
➤ Penyaluran zakat dan ushur kepada yang berhak menerimanya	➤ Jamuan untuk delegasi keagamaan, utusan suku dan negara serta biaya perjalanan
➤ Pembayaran gaji untuk wali, qady, guru,	➤ Hadiah untuk pemerintah negara lain

<sup>71</sup>Muh. Fudhail Rahman, “Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam”, (Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah), 2013, H.248-249.

<sup>72</sup>Muhammad Fauzan, *Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khattab*, (Jurnal: Human Falah, Vol.4 No.1 Januari –Juni 2017), h.55.

<sup>73</sup>Lilik Rahmawati, *Kebijakan Fiskal dalam Islam*, Al-Qānūn, Vol. 11, No. 2, Desember 2008, h.458.

<sup>74</sup>Sairi Erfanie, *Kebijakan Anggaran Pemerintah*, dalam Buku “Kebijakan Ekonomi dalam Islam (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) h. 51.



imam, muadzin dan pejabat negara Pembayaran upah para sukarelawan ➤ Pembayaran utang negara Bantuan untuk musafir (dari daerah fadak)	➤ Pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak ➤ Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin ➤ Pembayaran utang oran yang meninggal dalam keadaan miskin ➤ Pembayaran tunjangan untuk orang miskin ➤ Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah ➤ Pengeluaran rumah tangga Rasulullah saw ➤ Persediaan darurat
---	--

## E. Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam dibangun atas dasar agama islam, sebagai derivasi dari islam.<sup>75</sup> Munculnya ekonomi islam sejak agama islam dilahirkan. Ekonomi islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu melainkan bagian integral dari agama islam. Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia termasuk ekonomi.<sup>76</sup>

Sejak abad ke-8 telah muncul pemikiran-pemikiran ekonomi islam secara parsial, misalnya peran negara dalam ekonomi, kaidah berdagang, mekanisme pasar, dan lain-lain. Tetapi pemikiran secara komprehensif terhadap sistem ekonomi Islam sesungguhnya baru muncul pada pertengahan abad ke-20.

Berbagai ahli ekonomi Muslim mendefinisikan ekonomi islam dengan beragam pengertian. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut disampaikan definisi ekonomi islam dari beberapa ekonom muslim :<sup>77</sup>

#### a. Hazzanuzaman (1984) dan Metwally (1995)

Ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi islam. untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, digunakan metode fiqh untuk menjelaskan apakah fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah ataukah tidak.

Dalam hal ini, ekonomi islam dipandang lebih bersifat normatif ketika perkembangan ilmu ekonomi islam belum didukung oleh praktik. Ekonomi islam dianggap tidak memiliki kelemahan dan selalu dianggap benar. Kegagalan dalam memecahkan masalah ekonomi empiris dipandang bukan sebagai kelemahan ekonomi islam, melainkan kegagalan ekonom dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah.

#### b. Siddiqie (1992) dan Naqvi (1994)

Ekonomi islam merupakan representasi perilaku ekonom umat muslim untuk melaksanakan ajaran islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonom setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma, nilai-nilai dasar islam, batasan ekonomi dan status hukum, aplikasi dan analisis sejarah.

<sup>75</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia/P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h.13.

<sup>76</sup>*Ibid*, h.16

<sup>77</sup>*Ibid*, h.18.

**c. Mannan (1993), Ahmad (1992), dan Khan (1994)**

Ekonomi islam merupakan implementasi sistem etika islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Perbedaan pandangan muncul dalam mengidentifikasi spirit dasar islam yang terkait dengan ekonomi. Spirit inilah yang kemudian menjadi dasar penurunan ilmu ekonomi.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas kaum muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.<sup>78</sup>

Dalam pondasi ekonomi islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Secara ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar islami. Tujuan ekonomi islam adalah mencapai fahlah yang direalisasikan melalui optimalisasi masalah bagi seluruh masyarakat. Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya tanggung jawab terhadap perekonomian. Tugas pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri dalam islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan islam.

## **2. Ruang Lingkup dan Tujuan Ekonomi Islam**

Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Makroekonomi atau ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (*house hold*), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.<sup>79</sup>

Adapun ekonomi mikro atau mikroekonomi merupakan ilmu yang menangani perilaku satuan-satuan ekonomi individual termasuk di dalamnya ada pengambilan keputusan dalam rangka mengatasi permasalahan alokasi akibat kelangkaan sumber daya.

Dalam ilmu ekonomi modern dikenal prinsip ekonomi yang sekaligus merupakan falsafah kehidupan ekonomi yang menjadi keyakinan. Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang di dalamnya terkandung asas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal.

Dalam aplikasinya prinsip ini hanya menghasilkan pola pikir untung dan rugi yang menghilangkan aspek nilai ketika hal tersebut dianggap menguntungkan. Oleh karena itu ekonomi modern diarahkan untuk menjadikan para pelaku ekonomi (*homo economicus*)

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h.19.

<sup>79</sup> Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h.12.

yang selalu berorientasi pada kepuasan dan keuntungan material. Kemudian timbulah masalah ekonomi yang disebabkan oleh adanya kelangkaan (*scarcity*).<sup>80</sup>

Berbeda dengan ekonomi konvensional, seorang muslim mempunyai tujuan hidup untuk mewujudkan *masalahah* dalam meraih *falah* (*falah* diartikan sebagai kesejahteraan, kemuliaan, kesuksesan, dan kemenangan). *Falah* inilah yang selanjutnya menjadi tujuan akhir perilaku ekonomi muslim baik dari aspek dunia maupun aspek akhirat, baik dari aspek material maupun aspek spiritual. Sehingga kepuasan bukanlah menjadi segala-galanya dalam ekonomi, melainkan kepuasan akan diperoleh dari perilaku ekonomi muslim ketika terciptanya *masalahah* dan secara otomatis akan mencapai *falah*.

Ketika kebutuhan hidup yang seimbang dapat terpenuhi maka akan melahirkan apa yang disebut *masalahah*, yang diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial yang mampu meningkatkan kedudukan manusia. Menurut As-Shathibi *Maslahah* terdiri dari 5 hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*‘aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*wealth*).<sup>81</sup>

## F. Flypaper Effect

### 1. Pengertian Flypaper Effect

Untuk pertama kalinya pada tahun 1979 istilah *flypaper effect* diperkenalkan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld. Istilah *flypaper effect* digunakan untuk mengartikulasikan pemikiran dari Arthur Okun yang pada tahun 1930 yang menyatakan “*money sticks where it hits*”.<sup>82</sup>

Menurut Vegh dan Vuletin (2015), *flypaper effect* secara luas didokumentasikan sebagai peraturan dalam keuangan publik yang memegang kecenderungan pemerintah daerah untuk menghabiskan dana transfer lebih tinggi dari pada menghabiskan pendapatannya sendiri. Hamilton (1983) juga mendefinisikan *flypaper effect* sebagai kecenderungan pemerintah daerah untuk lebih bergantung pada dana transfer daripada menggunakan pendapatan asli daerah. Transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diberikan berdasarkan jangka waktu tertentu. Selama periode tersebut, penerimaan transfer mulai meningkat sehingga ada beberapa pihak tertentu yang memperoleh keuntungan. *Flypaper effect* dianggap sebagai suatu keanehan dalam perilaku yang sulit untuk dirasionalkan, dimana pemerintah daerah menggunakan transfer yang mereka terima dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pengeluaran daerah yang tidak konsisten dengan teori ekonomi (Hines dan Thaler, 1995).<sup>83</sup> Terdapat dua teori yang dapat menjelaskan fenomena *flypaper effect* ini, yang pertama adalah model birokratik (*bureaucratic model*) yang melihat dari perspektif birokrat dan yang kedua adalah ilusi fiskal (*fiscal illusion model*) yang melihat dari perspektif masyarakat.<sup>84</sup>

Menurut (Maimunah, 2016) *Flypaper effect* atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD.<sup>85</sup> *Flypaper effect* dianggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan

<sup>80</sup> *Ibid*, h.13.

<sup>81</sup> *Ibid*, h.14.

<sup>82</sup> A. Solikin, Analisis Flypaper Effect pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2016, h.13.

<sup>83</sup> Nur Isna Inayati dan Doddy Setiawan, “Fenomena FlyPaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.1 No.2, (Juni 2017), h.224-225.

<sup>84</sup> H Kuncoro. Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 2007, 1-29.

<sup>85</sup> Mutiara Maimunah, Flypaper Effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi*. Padang. 23 – 26 Agustus 2006, h.9.

pendapatan asli daerah. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Anomali yang timbul tersebut menghasilkan dua aliran pemikiran dari para pengamat ekonomi mengenai telaah *flypaper effect*, yakni Model Birokratik (*bureaucratic model*) dan Model Ilusi Fiskal (*fiscal illusion model*).<sup>86</sup>

## 2. Penyebab *Flypaper Effect*

*Flypaper Effect* muncul karena adanya penyimpangan dalam teori bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa transfer pemerintah pusat memang meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi ternyata tidak menjadi substitut bagi pajak daerah. Fenomena tersebut dikenal dengan *Flypaper Effect*. Menurut Sagbas dan Saruc (2008) ada dua teori utama dari beberapa penelitian tentang sumber munculnya *Flypaper Effect* yang sering digunakan yaitu Fiscal illusion dan The bureaucratic model. Teori Fiscal illusion sebagai sumber *Flypaper Effect* mengemukakan bahwa *Flypaper Effect* terjadi dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan serta keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut.<sup>87</sup>

## G. KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>88</sup> Menurut Muhammad kerangka berisi gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.<sup>89</sup> Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah didalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.<sup>90</sup>

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum ini ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. Termasuk didalam pengertian pemerataan kemampuan keuangan daerah adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada Daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.<sup>91</sup> Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi *asset*, atau terjadinya

<sup>86</sup>Bambang Agus Pramuka, *Flypaper effect pada pengeluaran pemerintah daerah di Jawa*, *jurnal ekonomi pembangunan*, Vol.11 No.1, (Juni 2010), h.3.

<sup>87</sup>Rahmatul Mulya dan Bustamam, Pengaruh *Flypaper Effect* pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No. 2, (2016), h.191.

<sup>88</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi* cetakan 7, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 93.

<sup>89</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 256.

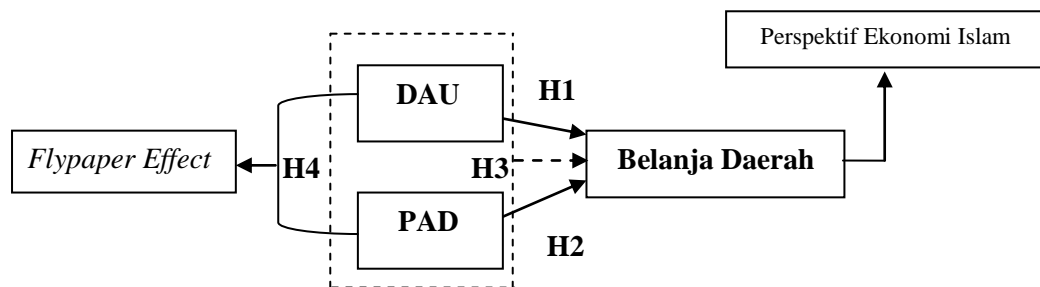
<sup>90</sup>Abdul halim, "akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah, (jakarta " salemba Empat, 2007) h.96.

<sup>91</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), h.110.

utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.<sup>92</sup>

Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah dan berpotensi terjadinya *FlyPaper Effect*, jika pemerintah daerah lebih sering atau lebih besar dalam penggunaan Dana Alokasi Umum dibandingkan penggunaan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kemandirian pemerintah daerah dalam hal finansial.

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 1**  
Kerangka Berfikir

## H. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah pada penelitian, belum jawaban yang empiris.<sup>93</sup> Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

Pengalokasian DAU di daerah tertentu didasarkan pada besar/kecil suatu celah fiskal (fiscal gap) yang terdapat di suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Daerah dengan potensi fiskal besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskal kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar, akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Semakin besar kebutuhan fiskal suatu daerah, maka belanja daerah di daerah tersebut akan semakin besar pula (Nurdini.,dkk, 2014). Apabila terjadi peningkatan terhadap jumlah alokasi dana DAU, maka belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah juga ikut meningkat (Jolianis, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Jolianis (2014), Kusumadewi dan Rahman (2007), Iskandar (2012), Amalia.,dkk (2015) menyatakan bahwa hubungan antara DAU terhadap belanja adalah positif.<sup>94</sup>

Hipotesis untuk menguji pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016-2019 adalah sebagai berikut :

Ho : DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016 – 2019.

H<sub>1</sub> : DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016 – 2019.

<sup>92</sup>Abdul Halim, “akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah” edisi ke-1 (jakarta : salemba empat, 2002), h.73.

<sup>93</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.93.

<sup>94</sup>Woro Tyas Pradipta Dan Bambang Jatmiko, “ Pengaruh Flypaper Effect, Pad, Dan Pdrb Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2016)”, *Review Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, Vol.2 No.2, H.174-175, 2018.

### **b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.**

Hipotesis yang dikemukakan oleh Maimunah dan Akbar (2008) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (terutama pajak) akan memberi pengaruh terhadap pengeluaran anggaran belanja pemerintah daerah, atau yang lebih dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Daerah yang memiliki PAD tinggi akan memiliki pengeluaran untuk alokasi belanja daerah yang tinggi pula (Jolianis, 2014). Semakin tinggi PAD yang diperoleh oleh daerah tersebut, semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada pemerintah pusat (Nurdini, 2014). Hasil penelitian Iskandar (2012), Sasana (2010), Salawali. dkk (2015), dan Khoiri dan Hasan (2015) dimana PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :<sup>95</sup>

Hipotesis untuk menguji pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016-2019 adalah sebagai berikut :

Ho : PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016 – 2019.

H<sub>2</sub> : PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016 – 2019.

### **c. Pengaruh DAU dan PAD secara simultan terhadap Belanja Daerah**

Pada dasarnya, ada dua sumber penerimaan daerah yaitu PAD dan Dana Perimbangan. Setiap daerah memiliki jumlah penerimaan yang berbeda serta memiliki perbedaan dalam prioritas pembangunannya. Untuk mendukung program pembangunan serta kinerja daerah, maka daerah dituntut untuk menyediakan fasilitas serta infrastruktur yang memadai. Pengeluaran tersebut berkaitan dengan Belanja Daerah. Belanja ini tentunya disesuaikan dengan besarnya penerimaan dari daerah yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku Belanja Daerah mempengaruhi DAU dan PAD yang memberikan kontribusi sesuai dengan aspek masing-masing yang dibutuhkan oleh daerah untuk kepentingan masyarakat.

Hipotesis untuk menguji pengaruh DAU dan PAD secara simultan terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016-2019 adalah sebagai berikut :

Ho : DAU dan PAD secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016 – 2019.

H<sub>3</sub> : DAU dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016 – 2019.

### **d. Flypaper Effect Pada Belanja Daerah**

*Flypaper effect* disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja daerah lebih banyak/lebih boros dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD. Hasil penelitian Susanti Eka Wahyuni dan Indrian Supheni (2017) terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012 - 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Armawaddin *et al.* (2017) menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model regresi berganda, terdeteksi adanya gejala *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten dan kota di Sulawesi yang bersumber dari dana bagi hasil pajak (DBHP)/bukan pajak (DBHBP), sedangkan yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) tidak terdeteksi adanya gejala *flypaper effect*.

Hipotesis untuk menguji terjadi atau tidaknya *flypaper effect* pada Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016-2019 adalah sebagai berikut :

Ho : Tidak terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016-2019.

H<sub>4</sub> : Terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016-2019.

---

<sup>95</sup>Ibid, h.175-176.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>96</sup>

##### **B. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *assosiatif* (hubungan), yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap variabel terikat yaitu Belanja Daerah. Dengan penelitian ini dapat dibangun teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol data.

##### **C. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang digunakan yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Lampung, yakni data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah tahun 2016 – 2019. Secara umum data dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan lain berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks.

##### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian.<sup>97</sup> Data dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

###### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber – sumber lain seperti buku, catatan, maupun hasil laporan terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian.<sup>98</sup>

###### **b. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan – catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang.<sup>99</sup> Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti dokumentasi penelitian berupa data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).

---

<sup>96</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2017), h.8.

<sup>97</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta : Balai Pustaka Press, 2015), h. 93.

<sup>98</sup>*Ibid*, h. 157.

<sup>99</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 422.

## E. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut.<sup>100</sup> Penelitian ini menggunakan populasi seluruh data APBD Kabupaten / Kota Provinsi Lampung sejak awal berdirinya masing - masing Kabupaten / Kota Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2020, dimana Provinsi Lampung memiliki 15 Kabupaten / Kota yaitu Lampung Timur berdiri sejak tahun 1999, Lampung Selatan berdiri sejak tahun 1954, Lampung Barat berdiri sejak tahun 1991, Tanggamus berdiri sejak tahun 1997, Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1682, Lampung Utara berdiri sejak tahun 1946, Lampung Tengah 1945, Metro berdiri sejak tahun 1999, Pesisir Barat berdiri sejak tahun 2012, Mesuji berdiri sejak tahun 2008, Pesawaran berdiri sejak tahun 2007, Pringsewu berdiri sejak tahun 1925, Tulang Bawang berdiri sejak tahun 1997, Tulang Bawang Barat berdiri sejak tahun 2008, Way Kanan berdiri sejak tahun 1999, Sehingga menghasilkan 817 data.

## F. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik populasi akan menyebabkan suatu penelitian akan menjadi biasa, tidak dapat dipercaya dan kesimpulannya pun bisa keliru. Hal ini karena tidak dapat mewakili populasi.<sup>101</sup> Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dimana populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memiliki kriteria sampel tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang telah menyerahkan laporan realisasi APBD-nya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK RI dan diserahkan ke Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.
2. Pemerintahan kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Lampung yang memiliki informasi keuangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai variabel penelitian. Informasi tersebut meliputi Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka sampel dalam penelitian ini adalah 14 Kabupaten / Kota Provinsi Lampung yaitu Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Bandar Lampung, Lampung Utara, Lampung Tengah, Metro, Pesisir Barat, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan pada periode tahun 2016-2019 dan menghasilkan data sebanyak 56 data sampel.

## G. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu :

<sup>100</sup> *Ibid*, h.115.

<sup>101</sup> Papundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), h. 33.

X1 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## 2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>102</sup> Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu :

Y = Belanja Daerah

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari masing – masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator – indikator yang membentuknya. Definisi operasional masing – masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	DAU (X1)	<i>Block grant</i> yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya.	Data DAU Tahun 2016 – 2019.	Rasio (Rupiah).
2	PAD (X2)	Pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.	Data PAD Tahun 2016 – 2019.	Rasio (Rupiah).
3	Belanja Daerah (Y)	Kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang tidak akan memperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.	Data Belanja Daerah Tahun 2016 – 2019.	Rasio (Rupiah).

<sup>102</sup>*Ibid*, h. 59.

## I. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel. Untuk menganalisis data dengan regresi menggunakan bantuan program *Eviews* 9.0. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data panel dengan variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis ini merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi tentang data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis.<sup>103</sup>

### 2. Model Estimasi Regresi Linear Data Panel

Dalam estimasi data panel umumnya terdapat tiga metode penghitungan, yaitu metode *Pooled Least Square (PLS)*, *Metode Fixed Effect (FEM)*, dan metode *Random Effect (REM)*. Ketiga metode tersebut berbeda satu sama lain, spesifikasi masing-masing metode sebagai berikut :<sup>104</sup>

#### a. Metode Pooled Least Square atau Common Effect

Model estimasi *common effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu dengan hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* tanpa harus melihat perbedaan antar waktu dan individu maka model dapat diestimasi menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Dengan metode *ordinary least square*, maka akan diasumsikan bahwa  $\beta_0$  akan sama (konstan) untuk setiap data *time series* dan *cross section*, atau diasumsikan bahwa *intercept* maupun *slope* (koefisien pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat) tidak berubah baik antar individu maupun antar waktu. Hasil regresi menunjukkan ketika X1 dan X2 berhubungan positif terhadap variabel Y. Uji statistik menunjukkan semua koefisien signifikan secara statistik dengan uji t pada  $\alpha = 1\%$  maupun uji keseluruhan dengan uji F.<sup>105</sup>

#### b. Metode Fixed Effect

Model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu. Hasil regresi metode *Fixed Effect* menunjukkan ketika X1 dan X2 bertanda positif dan secara statistik signifikan melalui uji t pada  $\alpha = 1\%$ . Semua variabel *dummy* bertanda negatif dan secara statistik juga signifikan. Dengan signifikannya variabel *dummy* menunjukkan bahwa intersep dari setiap individu berbeda. Dengan demikian model *Fixed Effect* mampu menjelaskan adanya perbedaan perilaku anata variabel.<sup>106</sup>

#### c. Metode Random Effect

Metode *Random Effect* akan mengestimasi model data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Model ini sangat berguna jika individu yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara *random* dan merupakan wakil dari populasi. Hasil untuk regresi *Random Effect* jika nilai variabel X1 dan X2 secara statistik signifikan pada  $\alpha = 1\%$  sehingga dapat diartikan bahwa X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap Y. Nilai intersep yang didapat merupakan nilai rata-rata dari komponen kesalahan random (*random error component*). Nilai *Random Effect* menunjukkan seberapa besar perbedaan

<sup>103</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h.19.

<sup>104</sup> Jaka Sriyana, "Metode Regresi Data Panel", (Yogyakarta : Ekosiana, 2014), h.81.

<sup>105</sup> Agus Widarjono, *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ekonosia, 2013), h.355.

<sup>106</sup> *Ibid*, h.357.

komponen kesalahan random sebuah perusahaan terhadap nilai intersep semua perusahaan (rata-rata).<sup>107</sup>

### 3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Secara teoritik menurut beberapa ahli Ekonometri dikatakan bahwa, jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu ( $t$ ) lebih besar dibandingkan jumlah individu ( $i$ ), maka disarankan menggunakan metode *Fixed Effect*. Sedangkan jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu ( $t$ ) lebih kecil dibandingkan jumlah individu ( $i$ ), maka disarankan menggunakan metode *Random Effect* (Sriyana, 2014:179). Namun dasar pertimbangan ini tidak sepenuhnya tepat, karena masih ada unsur keraguan didalamnya. Langkah yang paling baik adalah dengan melakukan pengujian.

Ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji statistic F atau disebut juga uji *Chow* digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Fixed Effect*. Kedua, uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. Ketiga, uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* atau metode *Random Effect*.<sup>108</sup>

#### a. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode *Common Effect*.

Hipotesis nol pada uji ini adalah bahwa intersep sama, atau dengan kata lain model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah intersep tidak sama atau model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Fixed Effect*.

Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

$H_0$  : maka digunakan model *Common Effect* (model pool).

$H_1$  : maka digunakan model *Fixed Effect* dan lanjut uji Hausman.

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji chow adalah sebagai berikut :

- Jika nilai *probability F* 0,05 artinya  $H_0$  diterima; maka model *common effect*.
- Jika nilai *probability F* < 0,05 artinya  $H_0$  ditolak, maka model *fixed effect* dan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau model *random effect*.

#### b. Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

Uji Hausman didasarkan pada kedua metode OLS dan GLS konsisten tetapi OLS tidak efisien di dalam hipotesis nol. Di lain pihak hipotesis alternatifnya metode OLS konsisten dan GLS tidak konsisten. Karena itu hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.

Hausman Test dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

$H_0$ : maka digunakan model *Random Effect*

$H_1$ : maka digunakan model *Fixed Effect*

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Hausman adalah sebagai berikut :

- Jika nilai *probability Chi-Square* 0,05 artinya diterima; maka model *random effect*.
- Jika nilai *probability Chi-Square* < 0,05 artinya diterima, maka model *fixed effect*.

<sup>107</sup> *Ibid*, h.361.

<sup>108</sup> Jaka Sriyana, "Metode Regresi Data Panel", (Yogyakarta : Ekosiana, 2014), h.180.

Sebagai dasar penolakan hipotesa nol maka digunakan statistik Hausman dan membandingkan dengan *Chi-square*. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak  $k$ . Dimana  $k$  adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka menolak hipotesis nol dan model yang tepat adalah *model Fixed Effect* sebaliknya ketika nilai Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka gagal menolak hipotesis nol dan model yang tepat adalah *Random Effect*.<sup>109</sup>

#### c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik daripada model *common effect* (OLS) digunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Uji signifikansi *random effect* ini dikembangkan oleh *Bruesch Pagan*. Metode *Bruesch Pagan* digunakan untuk menguji signifikansi *random effect* didasarkan pada nilai residual dari metode *common effect*.

Hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0$  = maka digunakan model *random effect*

$H_1$  = maka digunakan model *common effect*

Uji Lm ini didasarkan pada distribusi *chi-square* dengan *degree of freedom* sebesar sejumlah variabel independen. Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji LM adalah sebagai berikut:

- Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-square*,  $H_0$  maka ditolak, yang artinya model *random effect*.
- Jika nilai LM statistic lebih kecil dari nilai kritis statistic *chi-square* , maka  $H_1$  diterima, yang artinya model *common effect*.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan *Ordinary Least Squared* (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Meskipun begitu, dalam regresi data panel tidak semua uji perlu dilakukan.<sup>110</sup> Dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 uji asumsi klasik saja, yaitu sebagai berikut :

##### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).<sup>111</sup> Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.<sup>112</sup>

Untuk mengukur multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

##### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.<sup>113</sup> Beberapa metode untuk mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas adalah :

<sup>109</sup>Agus Widarjono, *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya*, (Jakarta : Ekonosia, 2013), h.265.

<sup>110</sup>Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS Dan EVIEWS*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.297.

<sup>111</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h. 105.

<sup>112</sup>Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h.105.

<sup>113</sup>Nor Juliansyah, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen* (Jakarta: PT. Grasindo, 2014), h.58.



- a. Uji White
- b. Uji Park
- c. Uji Glejser

Hasil Eviews menyatakan apabila nilai *Pro.Chi-Square* sebesar (>5%) maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

## 5. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah regresi linear untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya dua atau lebih. Adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e$$

Keterangan :

Y= Belanja Daerah

X1= DAU

X2= PAD

$\alpha$ = Konstanta

$\beta$ = Koefisien Regresi

i = Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung

e = Error

t = Tahun

Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

$$BD = a + DAU + PAD + e$$

## 6. Pengujian Hipotesis

### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah koefisien yang menjelaskan seberapa besar garis regresi menjelaskan perilaku datanya.<sup>114</sup> Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol (0) sampai dengan satu (1). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### b. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Cara menganalisis uji t adalah bila nilai signifikansi < 0,05 ( $\alpha=5\%$ ).<sup>115</sup>

### c. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap dependen secara simultan atau bersama-sama. Derajat kebebasan korelasi adalah  $dk = (n-k-1)$ . Dalam hal ini berlaku ketentuan bila  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  maka koefisien korelasi yang diuji adalah signifikan, yaitu dapat diberlakukan untuk seluruh populasi.<sup>116</sup>

<sup>114</sup>Jaka Sriyana, "Metode Regresi Data Panel", (Yogyakarta : Ekosiana, 2014), h.53.

<sup>115</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 278.

<sup>116</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 192.

## 7. Analisis *Flypaper Effect*

Untuk melihat apakah terjadi *flypaper effect* atau tidak dapat dilihat dari perbandingan antara koefisien DAU dan koefisien PAD, atau dapat difungsikan jika  $b_1 > b_2$  berarti  $\frac{b_1}{b_2} > 1$  maka terjadi *flypaper effect*.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup>Rahmatul Mulya dan Bustamam, Pengaruh Flypaper Effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 1, No. 2, (2016), h.193.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Provinsi Lampung**

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda. Tatkala Banten dibawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa (1651-1683) Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatra dan Maluku. Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan karena dihalang-halangi VOC yang bercokol di Batavia. Putra Sultan Agung Tirtayasa yang bernama Sultan Haji diserahi tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota kesultanan Banten.

Raffles meninggalkan Lampung tahun 1829 ditunjuk Residen Belanda untuk Lampung. Dalam pada itu sejak tahun 1817 posisi Radin Inten semakin kuat, dan oleh karena itu Belanda merasa khawatir dan mengirimkan ekspedisi kecil di pimpin oleh Assisten Residen Krusemen yang menghasilkan persetujuan. Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Radin Inten dan ia tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu pada tahun 1825 Belanda memerintahkan Leliever untuk menangkap Radin Inten, namun dengan cerdik Radin Inten dapat menyerbu benteng Belanda dan membunuh Leliever dan anak buahnya. Akan tetapi karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi perang Diponegoro (1825 - 1830), maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Tahun 1825 Radin Inten meninggal dunia dan digantikan oleh Putranya Radin Imba Kusuma. Setelah Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830 Belanda menyerbu Radin Imba Kusuma di daerah Semangka, kemudian pada tahun 1833 Belanda menyerbu benteng Radin Imba Kusuma, tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru pada tahun 1834 setelah Asisten Residen diganti oleh perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, maka Benteng Radin Imba Kusuma berhasil dikuasai. Radin Imba Kusuma menyingkir ke daerah Lingga, namun penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkan kepada Belanda. Radin Imba Kusuma kemudian di buang ke Pulau Timor. Dalam pada itu rakyat dipedalaman tetap melakukan perlawanan, "Jalan Halus" dari Belanda dengan memberikan hadiah-hadiah kepada pemimpin-pemimpin perlawanan rakyat Lampung ternyata tidak membawa hasil. Belanda tetap merasa tidak aman, sehingga Belanda membentuk tentara sewaan yang terdiri dari orang-orang Lampung sendiri untuk melindungi kepentingan-kepentingan Belanda di daerah Telukbetung dan sekitarnya. Hingga menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan periode perjuangan fisik setelah itu, putra Lampung tidak ketinggalan ikut terlibat dan merasakan betapa pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajah yang silih berganti. Sehingga pada akhirnya sebagai mana dikemukakan pada awal uraian ini pada tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I Provinsi Lampung.

##### **2. Geografi Provinsi Lampung**

Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km<sup>2</sup> termasuk pulau-pulau yang terletak padabagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera, dan dibatasi oleh :

- a. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di Sebelah Utara
- b. Selat Sunda, di Sebelah Selatan
- c. Laut Jawa, di Sebelah Timur
- d. Samudra Indonesia, di Sebelah Barat

Provinsi Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung karang dan Teluk betung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah “Radin Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti”, 28 Km dari Ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra. Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan :

- a. Timur - Barat berada antara :  $103^{\circ}40'$  -  $105^{\circ} 50'$  Bujur Timur
- b. Utara - Selatan berada antara :  $6^{\circ} 45'$  -  $3^{\circ}45'$  Lintang Selatan

### 3. Administrasi Pemerintahan Provinsi Lampung

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 adalah merupakan Keresidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjung karang – Teluk betung Selanjutnya Kota madya Tanjung karang Telukbetung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 14 (empat belas) Kabupaten / Kota , yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kabupaten Lampung Barat dengan Ibu kotanya Liwa, luas wilayahnya  $2.142,78 \text{ km}^2$  terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.
2. Kabupaten Tanggamus dengan Ibu kotanya Kota Agung, luas wilayahnya  $3.020,64 \text{ km}^2$  terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan Ibu kotanya Kalianda, luas wilayahnya  $700,32 \text{ km}^2$  terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan Ibukotanya Sukadana, luas wilayahnya  $5.325,03 \text{ km}^2$  terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan.
5. Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukotanya Gunung Sugih, luas wilayahnya  $3.802,68 \text{ km}^2$  terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan.
6. Kabupaten Lampung Utara dengan Ibu kotanya Kotabumi, luas wilayahnya  $2.725,87 \text{ km}^2$  terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan.
7. Kabupaten Way Kanan dengan Ibu kotanya Blambangan Umpu, luas wilayahnya  $3.921,63 \text{ km}^2$  terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan.
8. Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibu kotanya Menggala, luas wilayahnya  $3.466,32 \text{ km}^2$  terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.
9. Kabupaten Pesawaran dengan Ibu kota Gedong Tataan, luas wilayahnya  $2.243,51 \text{ km}^2$  terdiri dari 11 (Kecamatan) kecamatan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibu kota Pringsewu, luas wilayahnya  $625,00 \text{ km}^2$  terdiri 9 (sembilan) kecamatan
11. Kabupaten Mesuji dengan ibu kota Mesuji, luas wilayahnya  $2.184,00 \text{ km}^2$  terdiri 7 (tujuh) kecamatan

12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibu kota Panaragan Jaya, luas wilayahnya 1.201,00 km<sup>2</sup> terdiri 8 (delapan) kecamatan
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibu kota Krui., luas wilayahnya 2.907,23 km<sup>2</sup> terdiri 11 (sebelas) kecamatan
14. Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 296 km<sup>2</sup> terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan.
15. Kota Metro dengan luas wilayah 61,79 km<sup>2</sup> terdiri dari 5 (lima ) kecamatan.

#### 4. Penduduk

Penduduk Provinsi Lampung pada waktu Sensus Penduduk tahun 1961,1971,1980,1990, 2000 dan 2010 masing-masing sebesar 1.667.511, 2.775.695, 4.624.785, 6.015.803, 659.869 dan 7.608.405 orang.

### B. Gambaran Umum Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (gabungan antara data time series dan cross-sectional). Alat pengolah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah software Eviews, yang menggunakan regresi data panel untuk analisis deskriptif kuantitatif. Oleh karena itu, perlu dipahami perkembangan mengenai dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja daerah dari tahun 2016 sampai 2019.

#### 1. Dana Alokasi Umum di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang tujuan pengalokasiannya adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan belanja desentralisasi. Penggunaan dana alokasi umum sepenuhnya ditentukan oleh masing-masing daerah. Termasuk didalam pengertian pemerataan kemampuan keuangan daerah adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada Daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan. Pengertian pemerataan kemampuan fiskal daerah termasuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh daerah dalam rangka pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan komponen dari total anggaran pendapatan dan belanja pajak daerah. Penggunaan dana alokasi umum dan pendapatan umum lainnya dalam APBD harus tetap dijaga dalam rangka pencapaian tujuan otonomi daerah masing-masing yaitu peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Berikut data Reaslisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Lampung tahun 2016 – 2019 :

**Tabel 5**  
**Realisasi DAU Tahun 2016-2019**

REALISASI				
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Kab. Lampung Barat	523.586.535.000	519.160.196.000	521.743.958.000	543.777.950.000
Kab. Lampung Selatan	1.031.445.915.000	1.012.255.482.000	1.019.207.779.000	1.054.042.773.000
Kab. Lampung Tengah	1.341.242.293.000	1.317.680.979.000	1.319.480.688.000	1.378.175.214.000
<b>Kab. Lampung Utara</b>	<b>960.294.182.000</b>	<b>945.025.570.000</b>	<b>949.531.402.000</b>	<b>981.730.753.000</b>
Kab. Tanggamus	789.442.526.000	775.574.559.000	778.605.786.000	802.326.253.000
Kab. Tulang Bawang	614.655.240.000	599.655.961.000	612.112.587.000	639.431.562.000
Kab. Way Kanan	656.605.460.000	650.838.237.000	655.518.878.000	681.902.953.000
Kota Bandar Lampung	1.053.232.762.000	1.034.730.849.000	1.034.730.849.000	1.110.510.308.000

Kota Metro	463.881.055.000	453.830.037.000	455.732.157.000	476.738.335.000
Kab. Pesawaran	675.736.319.000	668.378.478.000	669.276.831.000	684.210.957.000
Kab. Pringsewu	633.088.784.000	621.967.450.000	621.967.450.000	639.677.501.000
Kab. Mesuji	447.672.298.000	444.344.769.000	446.272.067.000	455.225.458.000
Kab. Tulang Bawang Barat	464.431.679.000	459.231.176.000	463.478.442.000	488.530.984.000
<b>Kab. Pesisir Barat</b>	<b>413.299.797.000</b>	<b>410.991.252.000</b>	<b>417.316.170.000</b>	<b>435.029.435.000</b>

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 5 menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2016-2019) realisasi DAU yang dialokasikan bagi Pemerintah Daerah mengalami penurunan ditahun 2017. Kabupaten/kota yang meralisasikan DAU terbesar yaitu kabupaten Lampung Tengah sebesar 1.341.242.293.000 pada tahun 2016, 1.317.680.979.000 pada tahun 2017, 1.319.480.688.000 pada tahun 2018 dan 1.378.175.214.000 pada tahun 2019. Sedangkan kabupaten/kota yang merealisasikan DAU terendah yaitu kabupaten Pesisir Barat sebesar 413.299.797.000 pada tahun 2016, 410.991.252.000 pada tahun 2017, 417.316.170.000 pada tahun 2018, dan 435.029.435.000 pada tahun 2019. Dana perimbangan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan keuangan masing-masing daerah. Besaran kebutuhan fiskal tiap daerah tersebut diproyeksikan berdasarkan yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) , Produk Domestik Bruto per Kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Namun disadari bahwa kebijakan transfer ke daerah yang ditempuh untuk meminimalkan perbedaan fiskal antar daerah melalui DAU masih menghadapi tantangan besar dalam mengalokasikan dana penyesuaian tertentu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan formula dan standar. Selain itu, keberadaan dana perimbangan tidak dapat mewujudkan pembangunan daerah yang adil.

Dalam teori keagenan, dana alokasi umum berperan sebagai prinsipal, dan dana belanja daerah berperan sebagai agen. Dalam hal ini, DAU yang ditransfer dari pemerintah pusat dapat membantu keuangan pemerintah daerah yang pada akhirnya digunakan untuk mendanai belanja daerah, salah satunya untuk mempersempit kesenjangan fiskal di suatu daerah.

## 2. Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua pendapatan daerah yang bersumber dari sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan hasil penggabungan pendapatan daerah (termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan keuntungan perusahaan di daerah) dan hasil lain yang sesuai dengan peraturan di Indonesia. Berikut data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 :

**Tabel 6**  
**Realisasi PAD Tahun 2016-2019**

REALISASI				
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Kab. Lampung Barat	49.078.910.604	46.789.226.369	50.471.541.309	65.267.416.665
Kab. Lampung Selatan	184.063.778.379	206.061.231.196	21.541.164.186	275.464.317.224
Kab. Lampung Tengah	137.871.550.591	147.048.201.164	165.414.825.486	193.634.175.310
Kab. Lampung Utara	98.607.164.917	103.970.703.714	102.289.605.032	102.587.471.150
Kab. Tanggamus	23.712.889.208	60.338.632.814	61.714.421.073	76.050.778.580
Kab. Tulang Bawang	26.416.719.390	40.931.506.762	67.129.955.995	82.379.613.623
Kab. Way Kanan	44.346.945.472	49.551.283.408	56.764.985.088	62.353.560.984
<b>Kota Bandar Lampung</b>	<b>483.379.398.035</b>	<b>612.809.680.624</b>	<b>550.275.048.130</b>	<b>627.296.544.827</b>
Kota Metro	114.436.719.786	138.839.408.334	132.202.276.039	176.199.324.166
Kab. Pesawaran	41.956.848.583	117.629.412.764	71.824.582.142	86.313.480.516
Kab. Pringsewu	68.157.777.766	117.629.412.764	71.824.582.142	86.313.480.516
Kab. Mesuji	27.783.046.527	22.114.016.974	33.206.360.524	45.620.663.052

Kab. Tulang Bawang Barat	20.882.974.137	23.142.474.247	27.613.469.636	32.410.517.401
<b>Kab. Pesisir Barat</b>	<b>20.710.860.363</b>	<b>42.895.150.221</b>	<b>23.481.041.773</b>	<b>29.323.369.726</b>

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 6 menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2016-2019) realisasi PAD di kabupaten/kota Provinsi Lampung mengalami fluktuatif. Kabupaten/kota yang merealisasikan PAD terbesar yaitu kota Bandar Lampung sebesar 483.379.398.035 pada tahun 2016, 612.809.680.624 pada tahun 2017, 550.275.048.130 pada tahun 2018, dan 627.296.544.827 pada tahun 2019. Hal ini membuktikan potensi daerah Kota Bandar Lampung memainkan peran terbaiknya setiap tahun, sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah. Sedangkan kabupaten/kota yang merealisasikan PAD terendah yaitu kabupaten Pesisir Barat sebesar 20.710.860.363 pada tahun 2016, 42.895.150.221 pada tahun 2017, 23.481.041.773 pada tahun 2018, dan 29.323.369.726 pada tahun 2019.

Laju pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dari waktu ke waktu.

### 3. Belanja Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai penurunan nilai kekayaan bersih selama tahun anggaran yang bersangkutan. Berikut data Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 :

**Tabel 7**  
**Realisasi Belanja Daerah 2016-2019**

REALISASI				
Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Kab. Lampung Barat	999.084.481.888	1.122.380.535.135	1.109.753.247.080	1.126.018.591.759
Kab. Lampung Selatan	1.864.084.864.272	2.072.627.427.204	1.974.307.248.247	2.148.229.745.788
<b>Kab. Lampung Tengah</b>	<b>2.274.041.706.308</b>	<b>2.491.283.236.819</b>	<b>2.388.867.281.595</b>	<b>2.529.103.615.744</b>
Kab. Lampung Utara	1.634.691.696.234	1.800.605.956.168	1.677.655.829.986	1.676.300.350.023
Kab. Tanggamus	1.358.575.195.294	1.547.099.699.352	1.527.711.794.513	1.678.742.417.519
Kab. Tulang Bawang	1.132.055.773.834	1.148.944.548.987	1.182.413.916.744	1.190.187.623.366
Kab. Way Kanan	1.180.257.690.465	1.350.721.647.447	1.501.095.281.556	1.401.165.789.733
Kota Bandar Lampung	1.755.858.575.286	2.207.777.630.380	2.190.205.773.409	2.190.661.163.233
Kota Metro	875.876.415.196	839.011.920.310	870.142.022.924	904.564.346.213
Kab. Pesawaran	1.212.984.685.375	1.280.926.476.209	1.340.306.936.858	1.193.779.078.994
Kab. Pringsewu	1.188.366.264.867	1.183.049.916.577	1.159.675.730.787	1.193.779.078.994
<b>Kab. Mesuji</b>	<b>735.747.182.487</b>	<b>689.748.346.903</b>	<b>812.660.322.642</b>	<b>899.657.609.867</b>
Kab. Tulang Bawang Barat	867.115.790.170	845.176.384.817	966.957.969.034	958.598.521.942
Kab. Pesisir Barat	732.750.194.933	811.738.309.195	797.058.152.359	818.269.505.936

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 6 menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2016-2019) realisasi belanja daerah provinsi Lampung mengalami fluktuatif. Realisasi belanja daerah provinsi Lampung dari tahun 2016-2019 terbesar di kabupaten Lampung Tengah yaitu 2.274.041.706.308 pada tahun 2016, 2.491.283.236.819 pada tahun 2017, 2.388.867.281.595 pada tahun 2018, dan 2.529.103.615.744 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah semakin memperhatikan distribusi belanja daerahnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan merealisasikan belanja daerah untuk kebutuhan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah. Sedangkan kabupaten/kota dengan realisasi belanja daerah terendah yaitu kabupaten mesuji sebesar 735.747.182.487 pada tahun 2016, 689.748.346.903 pada tahun 2017, 812.660.322.642 pada tahun 2018, dan 899.657.609.867 pada tahun 2019. Rendahnya realisasi

belanja daerah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah belanja non produktif yang mendominasi APBD, sehingga nilai belanja daerah rendah.

## C. Analisis Data

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel penelitian yang dilihat dari jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut.

**Tabel 8**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

	<b>BD</b>	<b>DAU</b>	<b>PAD</b>
<b>Mean</b>	1.37E+12	7.20E+11	1.15E+11
<b>Median</b>	1.19E+12	6.45E+11	6.76E+10
<b>Maximum</b>	2.53E+12	1.38E+12	6.27E+11
<b>Minimum</b>	6.90E+11	4.11E+11	2.07E+10
<b>Std. Dev.</b>	5.10E+11	2.71E+11	1.39E+11
<b>Skewness</b>	0.723237	0.852040	2.605602
<b>Kurtosis</b>	2.441489	2.707426	9.212258
<b>Jarque-Bera</b>	5.609845	6.975470	153.4139
<b>Probability</b>	0.060511	0.030570	0.000000
<b>Sum</b>	7.66E+13	4.03E+13	6.45E+12
<b>Sum Sq. Dev.</b>	1.43E+25	4.05E+24	1.06E+24
<b>Observations</b>	56	56	56

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

Dari Tabel 8 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yaitu 56 data. Tabel diatas juga menunjukkan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Penjelasan dari masing-masing variabel akan diuraikan sebagai berikut:

Belanja daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 6.90E+11 dan nilai maksimum sebesar 2.53E+12. Belanja Daerah dari periode 2016-2019 diketahui nilai mean sebesar 1.37E+12, serta nilai standar deviasi sebesar 5.10E+11 yang artinya nilai mean lebih kecil dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi tinggi maka penyebaran nilainya tidak merata.

DAU (X1) memiliki nilai minimum sebesar 4.11E+11 dan nilai maksimum sebesar 1.38E+12. Dari periode 2016-2019 diketahui nilai mean sebesar 7.20E+11, serta nilai standar deviasi sebesar 2.71E+11 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

PAD (X2) memiliki nilai minimum sebesar 2.07E+10 dan Nilai maksimum sebesar 6.27E+11. Dari periode 2016-2019 diketahui nilai mean sebesar 1.15E+11, serta nilai standar deviasi sebesar 1.39E+11 yang artinya nilai mean lebih kecil dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi tinggi maka penyebaran nilainya tidak merata.

### 2. Model Estimasi Regresi Linear Data Panel

#### a. Model *Common Effect*

Model estimasi *common effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk melakukan estimasi data panel, yaitu hanya dengan menggabungkan data time series dan cross-sectional tanpa mempertimbangkan perbedaan waktu dan individu, Anda dapat menggunakan metode



OLS (*ordinary least square*) untuk melakukan estimasi. Hasil regresi model *common effect* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 9**  
**Model Common Effect**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/20/21 Time: 19:34				
Sample: 2016 2019				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 14				
Total panel (balanced) observations: 56				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.51E+10	4.14E+10	1.813285	0.0755
X1	1.743503	0.062323	27.97514	0.0000
X2	0.327011	0.121631	2.688549	0.0096
R-squared	0.959289	Mean dependent var		1.37E+12
Adjusted R-squared	0.957753	S.D. dependent var		5.10E+11
S.E. of regression	1.05E+11	Akaike info criterion		53.64200
Sum squared resid	5.83E+23	Schwarz criterion		53.75050
Log likelihood	-1498.976	Hannan-Quinn criter.		53.68406
F-statistic	624.4371	Durbin-Watson stat		1.439088
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

#### b. Model Random Effect

Metode *random effect* akan memperkirakan model data panel, di mana variabel yang mengganggu dapat berkorelasi satu sama lain dari waktu ke waktu dan antar individu. Model ini sangat berguna jika individu sebagai sampel dipilih secara acak dan mewakili populasi. Berikut ini hasil dari regresi model *random effect* dalam penelitian ini :

**Tabel 10**  
**Model Random Effect**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 01/20/21 Time: 19:36				
Sample: 2016 2019				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 14				
Total panel (balanced) observations: 56				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.58E+10	5.32E+10	1.612406	0.1128
X1	1.714511	0.079288	21.62385	0.0000
X2	0.415118	0.149193	2.782424	0.0075
Effects Specification				

			S.D.	Rho
Cross-section random			5.18E+10	0.2609
Idiosyncratic random			8.71E+10	0.7391
Weighted Statistics				
R-squared	0.925596	Mean dependent var		8.81E+11
Adjusted R-squared	0.922789	S.D. dependent var		3.35E+11
S.E. of regression	9.32E+10	Sum squared resid		4.60E+23
F-statistic	329.6649	Durbin-Watson stat		1.779001
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.958881	Mean dependent var		1.37E+12
Sum squared resid	5.89E+23	Durbin-Watson stat		1.390293

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

### c. Model *Fixed Effect*

Model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individual adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu. Hasil regresi model *fixed effect* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 11**  
**Model *Fixed Effect***

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/20/21 Time: 19:35				
Sample: 2016 2019				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 14				
Total panel (balanced) observations: 56				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.29E+12	6.01E+11	2.144808	0.0381
X1	-0.118198	0.854986	-0.138245	0.8907
X2	1.422550	0.380299	3.740607	0.0006
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.978799	Mean dependent var		1.37E+12
Adjusted R-squared	0.970849	S.D. dependent var		5.10E+11
S.E. of regression	8.71E+10	Akaike info criterion		53.45383
Sum squared resid	3.04E+23	Schwarz criterion		54.03250
Log likelihood	-1480.707	Hannan-Quinn criter.		53.67818
F-statistic	123.1154	Durbin-Watson stat		2.098949
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

### 3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

#### a. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau metode *Common Effect*.

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji chow adalah sebagai berikut :

- c. Jika nilai *probability F* 0,05 artinya  $H_0$  diterima; maka model *common effect*.
- d. Jika nilai *probability F* < 0,05 artinya  $H_0$  ditolak, maka model *fixed effect* dan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau model *random effect*.

Berikut hasil pengujiannya :

**Tabel 12**  
**Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: FEM				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test		Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F		2.831525	(13,40)	0.0058
<b>Cross-section Chi-square</b>		36.537377	13	<b>0.0005</b>

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil pengujian antara *common effect* dan *fixed effect* didapatkan nilai probabilitas *cross-section chi-square* sebesar 0.0005. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa 5% ( $0.0005 < 0,05$ ). Secara statistik menolak  $H_0$  sehingga model yang tepat digunakan adalah model *fixed effect*.

#### b. Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan Uji Hausman adalah sebagai berikut :

- c. Jika nilai *probability Chi-Square* 0,05 artinya diterima; maka model *random effect*.
- d. Jika nilai *probability Chi-Square* < 0,05 artinya diterima, maka model *fixed effect*.

Berikut hasil pengujiannya :

**Tabel 13**  
**Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test				
Equation: REM				
Test cross-section random effects				
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	9.628703	2	<b>0.0081</b>	

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel uji Hausman diperoleh nilai distribusi *chi-square* dari perhitungan menggunakan *Eviews 9* sebesar 9.628703 dengan probabilitas 0.0081 (kurang dari 5%), sehingga model yang tepat digunakan adalah model estimasi *fixed effect*

Setelah melakukan Uji Chow dan Uji Hausman maka terpilihlah model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model *fixed effect*.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai *corelation* < 0,90 maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

**Tabel 14**  
**Uji Multikolinearitas**

	X1	X2
X1	1.000000	<b>0.549027</b>
X2	<b>0.549027</b>	1.000000

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas, nilai *corelation* antara X1 dan X2 sebesar  $0.549027 < 0,90$ , maka dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah multikolinearitas.

##### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pengujian asumsi heteroskedastisitas dapat dilihat melalui *white test*. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas :

**Tabel 15**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	2.042647	Prob. F(5,50)	0.0885
<b>Obs*R-squared</b>	9.498596	<b>Prob. Chi-Square(5)</b>	<b>0.0908</b>
Scaled explained SS	11.28159	Prob. Chi-Square(5)	0.0461

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel Datas, Nilai Prob. Chi Square (Obs\*R-Square) Sebesar  $0.0908 > 0.05$ , Maka dapat disimpulkan bahwa data Tidak Terjadi Masalah Heteroskedastisitas.

#### 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model pengujian regresi linear berganda merupakan model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016-2019. Adapun hasil dari uji regresi linear berganda pada variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 16**  
(*Fix Effect Model*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<b>C</b>	<b>1.29E+12</b>	6.01E+11	2.144808	0.0381
<b>X1</b>	<b>-0.118198</b>	0.854986	-0.138245	0.8907
<b>X2</b>	<b>1.422550</b>	0.380299	3.740607	0.0006

Sumber Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e$$

$$BD = 1.29E+12 - 0.118198 \text{ DAU} + 1.422550 \text{ PAD}$$

Berdasarkan koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan persamaan regresi menunjukan bahwa nilai konstanta (a) sebesar 1.29E+12, menyatakan bahwa jika nilai DAU dan PAD adalah 0, maka besarnya Belanja Daerah adalah 1.29E+12. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika DAU dan PAD dalam kondisi konstan 0 maka Belanja Daerah Provinsi Lampung akan naik sebesar 1.29E+12.
- Berdasarkan persamaan regresi nilai koefisien regresi untuk DAU sebesar -0.118198 dengan nilai negatif, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan DAU sebesar 1 satuan maka Belanja Daerah akan menurun sebesar -0.118198 dengan asumsi variabel yang lain konstan.
- Berdasarkan persamaan regresi nilai koefisien regresi untuk PAD sebesar 1.422550 dengan nilai positif, hal ini berarti bahwa setiap peningkatan PAD sebesar 1 satuan maka Belanja Daerah akan meningkat sebesar 1.422550 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

## 6. Hasil Uji Hipotesis

### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah koefisien yang menjelaskan seberapa besar garis regresi menjelaskan perilaku datanya.<sup>118</sup> Koefisien determinasi memiliki nilai antara nol (0) sampai dengan satu (1). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut merupakan tabel hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini :

**Tabel 17**  
**Uji  $R^2$**   
(*Model Fixed Effect*)

R-squared	0.978799	Mean dependent var	1.37E+12
Adjusted R-squared	<b>0.970849</b>	S.D. dependent var	5.10E+11
S.E. of regression	8.71E+10	Akaike info criterion	53.45383
Sum squared resid	3.04E+23	Schwarz criterion	54.03250
Log likelihood	-1480.707	Hannan-Quinn criter.	53.67818
F-statistic	123.1154	Durbin-Watson stat	2.098949
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

<sup>118</sup>Jaka Sriyana, "Metode Regresi Data Panel", (Yogyakarta : Ekosiana, 2014), h.53.

Nilai Adjusted R-Square sebesar 0.970849 atau sebesar 97% mengandung arti bahwa variasi Y (Belanja Daerah) dapat dijelaskan oleh X1 (DAU) dan X2 (PAD) sebesar 97%, sedangkan sisanya sebesar 3% ( $100\% - 97\% = 3\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### b. Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah secara parsial. Berikut merupakan tabel hasil uji parsial pada penelitian ini :

**Tabel 18**

**Uji t**

**(Model Fixed Effect)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.29E+12	6.01E+11	2.144808	0.0381
<b>X1</b>	<b>-0.118198</b>	0.854986	-0.138245	<b>0.8907</b>
<b>X2</b>	<b>1.422550</b>	0.380299	3.740607	<b>0.0006</b>

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 18 diatas dapat diuraikan pengaruh tiap-taip variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

##### 1. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Hasil Uji signifikansi menunjukan bahwa DAU memperoleh nilai koefisien sebesar -0.118198 dan nilai Probabilitas sebesar  $0.8907 > 0.05$ , yang berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak maka DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2016-2019. Sehingga meningkat atau menurunnya DAU tidak akan mempengaruhi Belanja Daerah.

##### 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Hasil Uji signifikansi menunjukan bahwa PAD memperoleh nilai koefisien sebesar 1.422550 dan nilai probabilitas sebesar  $0.0006 < 0.05$ , yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima maka PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota Provinsi Lampung 2016-2019. Peningkatan PAD akan meningkatkan Belanja Daerah, dan semakin besar PAD semakin besar pula Belanja Daerah kabupaten/kota Provinsi Lampung.

#### c. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah secara simultan. Kriteria pengujian menyatakan jika nilai probabilitas < nilai signifikansi 0,05 maka terdapat pengaruh signifikansi secara simultan antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Berikut merupakan tabel hasil uji simultan pada penelitian ini :

**Tabel 19**

**Uji F**

**(Model Fixed Effect)**

R-squared	0.978799	Mean dependent var	1.37E+12
Adjusted R-squared	0.970849	S.D. dependent var	5.10E+11
S.E. of regression	8.71E+10	Akaike info criterion	53.45383
Sum squared resid	3.04E+23	Schwarz criterion	54.03250
Log likelihood	-1480.707	Hannan-Quinn criter.	53.67818

F-statistic	123.1154	Durbin-Watson stat	2.098949
<b>Prob(F-statistic)</b>	<b>0.000000</b>		

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

Pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan nilai probabilitasnya sebesar  $0,00 < 0,05$ . Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang artinya secara simultan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

### 7. Analisis *Flypaper Effect*

Untuk melihat apakah terjadi *flypaper effect* atau tidak dapat dilihat dari perbandingan antara koefisien DAU dan koefisien PAD. Jika nilai koefisien DAU lebih besar dari pada nilai koefisien PAD maka terjadi *flypaper effect* begitupun sebaliknya. Berikut analisis *flypaper effect* dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 20**  
**Analisis *flypaper effect***  
**(Model *Fixed Effect*)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.29E+12	6.01E+11	2.144808	0.0381
<b>X1</b>	<b>-0.118198</b>	0.854986	-0.138245	0.8907
<b>X2</b>	<b>1.422550</b>	0.380299	3.740607	0.0006

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

Dapat dilihat pada nilai koefisien DAU sebesar -0.118198 lebih kecil dari koefisien PAD sebesar 1.422550 hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak, dimana memiliki arti bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2016-2019.

## D. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil uji signifikan untuk uji parsial (Uji t) pada Variabel X1 (DAU) memperoleh nilai *Coefficient* sebesar -0.118198, nilai *t-statistic* sebesar -0.138245 dan nilai *probability* sebesar 0.8907 atau ( $> 5\%$ ) dan bernilai negatif maka variabel X1 (DAU) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Belanja Daerah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak yang berarti variabel DAU dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016-2019. Penolakan hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pemprov tidak lagi menggunakan DAU sebagai sumber utama kebutuhan pendanaan. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan DAU sebesar 1 satuan maka Belanja Daerah akan menurun sebesar -0.118198 dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan yang diperoleh dari APBN yang pengalokasiannya bertujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan berbagai daerah dan menyediakan dana untuk belanja daerah dalam bentuk pelaksanaan desentralisasi. Namun menurut Iskandar (2012), keberadaan DAU berdampak buruk terhadap aliran transfer, karena pemerintah daerah cenderung menggunakan DAU dalam jumlah yang lebih besar dari dana daerah aslinya untuk memenuhi kebutuhan belanja. Pada saat yang sama, hal tersebut bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang mengharuskan kemandirian masing-masing daerah untuk tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat.

Ditolaknya hipotesis pertama menunjukkan bahwa pemerintah provinsi tidak lagi menggunakan DAU sebagai sumber utama untuk membiayai kebutuhan belanja. Hal ini sejalan

dengan penelitian Woro Tiyas Pradipta dan Bambang Jatmiko (2018), Herdiyanto (2014), Shiddieqy dan Afriana (2013), Nur (2015), Sriwahyuni (2010) dan Setyorini (2013).

## **2. Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung**

Berdasarkan hasil uji signifikan untuk uji parsial (Uji t) pada Variabel X1 (PAD) memperoleh nilai *Coefficient* sebesar 1.422550 nilai *t-statistic* sebesar 3.740607 dan nilai *probability* sebesar 0.0006 atau ( $< 5\%$ ) maka variabel X1 (PAD) berpengaruh terhadap variabel Y (Belanja Daerah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang berarti variabel PAD dalam penelitian ini berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016-2019.

Koefisien regresi PAD sebesar 1.422550 dan bernilai positif artinya PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, Artinya, dengan meningkatnya PAD maka belanja daerah juga akan meningkat. Begitu pula ketika PAD menurun, belanja daerah juga akan menurun. Maka kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 satuan akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 1.422550 dan sebaliknya, penurunan PAD sebesar 1 satuan akan menurunkan Belanja Daerah sebesar 1.422550. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai pendapatan asli daerah kabupaten /kota Provinsi Lampung maka semakin besar nilai realisasi belanja pemerintah daerah kabupaten /kota Provinsi Lampung. Dalam hal pendapatan asli daerah tinggi, pemerintah dapat mengalokasikan belanja daerah sebanyak-banyaknya. Namun, jika pendapatan asli daerah rendah, pemerintah akan kesulitan melaksanakan belanja daerah secara maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Belanja daerah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, pelayanan publik dan peningkatan perekonomian daerah, sehingga kesejahteraan rakyatnya merupakan salah satu bentuk desentralisasi. Penerapan desentralisasi di Indonesia mensyaratkan bahwa setiap pemerintah daerah harus menjadi daerah yang mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Menurut Halim (2007) untuk meminimalkan ketergantungan daerah kepada pusat, maka Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar dalam hal membiayai kebutuhan belanja daerah. Oleh sebab itu, semakin besar anggaran belanja daerah, semakin besar pula PAD yang harus dimiliki oleh daerah tersebut. Peningkatan jumlah PAD pada Provinsi di Indonesia setiap tahunnya menggambarkan mengenai kinerja daerah yang juga meningkat setiap tahunnya dalam menggali potensi yang dimiliki oleh daerahnya untuk dijadikan PAD. Salah satu sumber PAD terbesar adalah pajak daerah, sehingga apabila terjadi peningkatan PAD maka kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya juga meningkat. Selanjutnya tugas pemerintah daerah adalah memperbaiki fasilitas publik sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan.

Menurut Halim (2007), untuk meminimalisir ketergantungan daerah pada pusat maka pendapatan asli daerah harus menjadi sumber pendanaan terbesar dalam hal pembiayaan kebutuhan belanja daerah. Oleh karena itu, semakin besar anggaran belanja daerah maka semakin besar pula PAD yang harus dimiliki daerah. Jumlah PAD di provinsi di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa kinerja daerah juga semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam menggali potensi daerah. Salah satu sumber PAD terbesar adalah pajak daerah, sehingga jika PAD meningkat maka kesadaran pajak wajib pajak juga akan meningkat. Selain itu, tugas pemerintah daerah adalah memperbaiki fasilitas umum agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pajak yang dibayarkan. Hasil pengujian ini di dukung dengan penelitian Maimunah (2006), Hamdani (2014), Masdjojo (2009) dan Herdiyanto (2014), Nurdini. dkk (2014), Jolianis (2014), Sasana (2010). Dimana Pendapatan daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah terus meningkat dan upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah terhadap pos-pos penerimaan PAD



dilakukan secara memadai. Sementara belanja daerah menunjukkan bahwa semakin meningkat pendapatan daerah, maka semakin banyak pula belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah.

### 3. Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Secara Simultan

Dari hasil uji F (uji simultan) diperoleh hasil nilai *Probability F-statistic* sebesar 0.000000 (<5%) maka secara simultan variabel X1 (DAU) dan X2 (PAD) berpengaruh terhadap variabel Y (Belanja Daerah). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima yang berarti secara simultan variabel DAU dan PAD dalam penelitian ini berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung 2016-2019.

Variabel ini berperan penting dalam belanja daerah. Dari hasil regresi koefisien terlihat bahwa koefisien berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Belanja daerah kota-kota di Provinsi Lampung terus meningkat setiap tahunnya. Kenaikan belanja bisa jadi karena berbagai alasan, misalnya tambahan hibah (transfer), transfer ini bisa dalam bentuk DAU, DAK, DBH, tentunya juga masuk dalam saldo dana. Jika PAD meningkat, tentunya belanja daerah juga akan meningkat. Karena dengan bertambahnya pendapatan maka pengeluaran juga akan meningkat, seperti di Provinsi Lampung. Hasil pengujian ini mendukung dengan hasil pengujian Herdiyanto (2014), Prakosa (2004), Maimunah (2006), Kusumadewi (2007) bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sehingga dapat mendukung penelitian ini.

### 4. *Flypaper Effect*

*Flypaper Effect* dapat dikatakan suatu kondisi dimana pengeluaran atau motivasi pemerintah daerah akan semakin meningkat, karena hal ini lebih disebabkan oleh pembayaran transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, bukan oleh asli daerah sendiri.. Dampak dari “*flypaper effect*” biasanya negatif karena mengacu pada kurangnya kemandirian suatu daerah, Kemandirian di sini berarti pemerintah daerah lebih mengandalkan atau berharap pemerintah pusat memberikan bantuan transfer. Pengeluaran daerah atau pengeluaran yang dibandingkan dengan penggunaan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri, biasa disebut pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil nilai Koefisien DAU sebesar -0.118198 lebih kecil dari koefisien PAD sebesar 1.422550 hal ini berarti H0 diterima dan H4 ditolak, dimana memiliki arti bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2016-2019.

Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung merupakan daerah yang mandiri karena lebih banyak menggunakan PAD dibandingkan DAU dalam belanja daerah tahun 2016-2019. Dengan demikian, Provinsi Lampung dapat dikatakan memiliki keuangan daerah yang cukup baik dan telah mampu mengoptimalkan PAD yang kemudian dijadikan sumber utama dalam membiayai kebutuhan belanja daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung tahun 2016-2019 tidak memiliki model ketergantungan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Herdiyanto (2014), Kang dan Setyawan (2012), Liando (2017), Khoiri dan Hasan (2015), Rahmawati (2015), dan Mentayani. dkk (2015).

### 5. Belanja Daerah dalam perspektif Ekonomi Islam

Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk masalah Negara dan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, organisasi mendapat perhatian utama. Al-Mawardi seorang pemikir terkemuka abad ke-5 berpendapat bahwa pelaksanaan imamah (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, negara memiliki peran aktif demi terealisasinya tujuan material dan spiritual. Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu Negara

bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja. Akan tetapi sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara'. Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan fiskal. Akan tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasnya. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah Al-Qur'an. Dalam Islam, walaupun pola anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional (klasik dan neoklasik), namun penggalan sumber-sumber dana didasarkan pada syariah. Terhadap pengaturan pendapatan publik, Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ketujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan dana disebut Baitul Mal atau bendahara negara.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan, dan mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi dengan prinsip "Kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar diantara orang-orang kaya saja" prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan.

Dalam mengalokasikan sumber penerimaan terhadap pengeluaran tidak serta merta dilakukan untuk pengeluaran tersebut. Ada pengaturan pengeluaran semua ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan dan hukum di Negaranya masing-masing. Seperti Hadits Nabi yang menjelaskan hak pemerintah dalam mengelola zakat, yang artinya: *"Imran bin Husein pernah diangkat untuk mengurus/mengelola harta zakat dan ia menceritakan bahwa kami menarik zakat dari pengalaman kami menarik zakat pada zaman Nabi Muhammad SAW begitu juga menyalurkankannya"* (HR. Bukhari No.1883)

Hadist ini menjelaskan bahwa pemerintah memiliki hak dalam memungut zakat sesuai dengan pengalaman pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga dapat tercapainya anggaran Pendapatan Negara yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembangunan di jaman kejayaan Islam. Dalam Islam pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjalankan perekonomian pemerintahannya agar terjadinya stabilitas ekonomi dan terhindar dari hal buruk yang dapat mengancam pertumbuhan ekonomi yang juga akan berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Setiap *income* yang masuk kedalam lembaga Baitul Maal mempunyai mekanisme masing-masing untuk dikeluarkan atau dibelanjakan oleh Negara, sehingga akan mempunyai dampak positif terhadap perekonomian Negara dan masyarakat.

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran dan pendapatan yang berada di tangan pemerintah atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam alokasi belanja berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari peningkatan belanja modal, yang secara tidak langsung sejalan dengan tujuan pembangunan dalam ekonomi Islam itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Furqan : 67 :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا - ٦٧

Artinya: “Dan orang-orang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Pengeluaran haruslah ditujukan untuk hal-hal yang jelas bermanfaat dan hemat, tidak boros dan Islam tidak memperbolehkan penimbunan harta karena dengan penimbunan itu, kekayaan tidak dapat beredar dan manfaat penggunaannya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam pandangan Islam setiap Pengeluaran pemerintah perlu didistribusikan pada kegiatan sosial dan ekonomi tanpa menghambur-hamburkan ataupun pemborosan dalam mengelola keuangan seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Isra : 26 :

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ ثَبَدًا - ٢٦

Artinya :

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Penjelasan dalam ayat diatas bahwa Allah SWT telah melarang hamba-hambanya baik perseorangan ataupun lembaga untuk menghambur-hamburkan hartanya terlalu berlebihan. Sebab apabila masyarakat dan pemerintah terlalu boros maka laju pertumbuhan pun akan melambat. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan dana yang didapatkan dari sumber Pendapatan Asli Daerah lebih kepada pembelanjaan-pembelanjaan yang bersifat membangun dan merangsang perekonomian di daerah tersebut.

Kebijaksanaan makroekonomi dan pembangunan regional di Provinsi Lampung pada tahun 2019 berjalan efektif dengan ditandai tercapainya target yang telah ditetapkan. Perekonomian Lampung tumbuh positif diatas rata-rata ekonomi nasional. Perekonomian Lampung tahun 2019 semakin baik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi 5,27 persen, menguat dibanding tahun lalu yaitu 5,25 persen. Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi motor utama PDRB Lampung yang didukung sektor Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) yang meningkat kontribusinya terhadap PDRB seiring dengan meningkatnya realisasi investasi di Provinsi Lampung. dari sisi penawaran, pertanian masih menjadi *leading sektor* dengan komoditas unggulan seperti ubi kayu, jagung, padi dan kedelai.

Inflasi tetap terkendali sebesar 3,44 persen (c-to-c). Bawang merah, telur ayam ras, cabai merah dan tomat sayur menjadi komoditas penyumbang inflasi tahun 2019. Peran pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan menjadi poin penting dalam mengendalikan inflasi terutama saat *festive moment* seperti hari raya Idul Fitri dan Natal.

Indikator makroekonomi fundamental yang kondusif sepanjang tahun 2019 menjadi modal penting dalam menjalankan program pemerintah. Dari indikator dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung meningkat menjadi 69,7 persen belum berhasil memperbaiki posisi Lampung yang menempati nilai terbawah di Sumatra. Angka kemiskinan menurun namun lebih lambat dari penurunan kemiskinan nasional sehingga presentase penduduk miskin di Lampung masih tetap diatas rata-rata kemiskinan nasional. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun 0,03 persen dari tahun lalu menjadi 4,03 persen. Namun produktivitas tenaga kerja di Provinsi Lampung masih tergolong rendah dimana lebih dari sepertiga pekerja bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Secara umum pelaksanaan APBN Provinsi Lampung tahun ini lebih baik dari tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan Realisasi penerimaan Perpajakan yang merupakan sumber utama pendapatan sebesar 76,86 persen. Pertumbuhan ini belum mampu berkontribusi pada rasio pajak yang stagnan.

Belanja Pemerintah Pusat masih didominasi belanja pegawai dengan postur 10,9 persen dari total belanja. Pemerintah Pusat melalui APBN juga membiayai beberapa proyek strategis nasional

di Lampung. Realisasi pendapatan APBD agregat Provinsi Lampung tahun ini mencapai Rp27,98 triliun. Porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD meningkat 0,3 persen mengindikasikan peningkatan kemandirian Provinsi Lampung. Sementara itu, realisasi belanja APBD naik 0,4 persen dibanding tahun lalu. Kualitas belanja APBD semakin menurun tercermin pada menurunnya belanja modal dari 22,7 persen menjadi 17,5 persen dari total belanja. Porsi dana perimbangan tahun 2019 juga naik tipis sebesar 0,5 persen. Pada tahun 2013 Provinsi Lampung memiliki angka Prevalensi Stunting sebesar 42,6, angka tersebut berubah menjadi 27,3 pada tahun 2018 dengan adanya tingkat penurunan sebesar 15,3 (Kedua terbesar di Indonesia setelah Provinsi Papua Barat) menjadikan angka Prevalensi Provinsi Lampung berada dibawah rata-rata Nasional yang sebesar 30,8. Kerangka penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Untuk itu perlu mensinergikan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pencegahan stunting di Provinsi Lampung agar pencegahan stunting lebih terarah dan tepat sasaran.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Selain itu dalam suatu perekonomian peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur antara pendapatan dan pengeluaran yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung harus lebih memaksimalkan dalam mengelola sumber daya yang ada dan sumber pembiayaannya melalui anggaran APBD ke pengeluaran yang lebih produktif untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab (*responsibility*) sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Tanggung jawab yang dimaksud ialah bertanggung jawab kepada pemberi amanah yaitu Allah SWT, terhadap diri sendiri dan masyarakat luas (*stakeholders*).

Pertanggung jawaban berarti bahwa pemerintah sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab moral kepada Allah SWT atas kewajibannya, harta yang menjadi milik orang banyak dalam islam adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan hasil penelitian “Analisis Fenomena *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2019 Dalam Perspektif Ekonomi Islam” sebagai berikut :

1. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung, artinya apabila DAU meningkat atau menurun tidak mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah atau Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2019.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2019, artinya apabila PAD meningkat maka pengeluaran Pemerintah Daerah atau Belanja Daerah juga mengalami peningkatan.
3. Secara simultan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2019.
4. Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung selama Tahun 2016-2019 terbukti tidak terjadi *Flypaper Effect*, karena pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Lampung termasuk daerah yang mandiri karena lebih banyak menggunakan PAD dari pada DAU untuk belanja daerah. Maka dapat dikatakan bahwa Provinsi Lampung memiliki keuangan daerah yang cukup baik, ini menunjukkan Provinsi Lampung tidak memiliki pola ketergantungan.
5. Terdapat beberapa program pemerintah daerah yang masih belum terarah dan tepat sasaran, hal ini menunjukkan belum adanya keadilan pemerintah dalam membelanjakan belanja daerah. Jelas hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang dimana pengeluaran haruslah ditujukan untuk hal-hal yang jelas, bermanfaat, hemat, dan tidak boros karena islam melarang penimbunan harta karena dengan penimbunan itu, kekayaan tidak dapat beredar dan manfaat penggunaannya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

#### **B. Keterbatasan**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan, oleh karena itu diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk lebih memperhatikan dan dapat melakukan perbaikan pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel DAU, PAD dan Belanja Daerah.

#### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas dan dari kesimpulan yang didapat maka, beberapa saran yang dapat diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Bagi pemerintah daerah Provinsi Lampung sebaiknya meningkatkan perencanaan di periode yang akan datang dalam menyusun anggaran daerahnya agar lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah. Selain itu semua pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah baik yang berasal dari transfer pemerintah

pemerintah pusat maupun pendapatan asli daerah yang harus dapat digunakan dengan tepat sasaran sehingga dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Kantong-kantong utama kemiskinan lebih banyak terkonsentrasi dipedesaan, sudah selayaknya Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan bantuan sosial dengan sasaran masyarakat miskin agar lebih efektif dan tepat sasaran. Pemanfaatan Dana Desa diarahkan untuk memberdayakan masyarakat desa agar kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. IPM Lampung meskipun naik tetapi masih tertinggal dari rata-rata Nasional. Untuk mengakselerasi peningkatan IPM Lampung, pemerintah agar lebih fokus ke sektor pendidikan dan kesehatan karena tingkat pendidikan dan kesehatan agar kualitas pendidikan dan kesehatan bias lebih baik lagi.

## **2. Bagi Publik**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini sangat diharapkan kepada masyarakat dapat lebih meningkatkan kesadaran akan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibayarkan kepada pemerintah, karena hal ini dapat dijadikan sebagai umpan balik (timbang balik) kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya.

## **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau memperluas sampel, seperti mengkaji provinsi yang ada di Indonesia, sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan pengetahuan tentang daerah mana saja yang sudah mandiri atau belum. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain dalam penelitian ini, seperti wawancara secara langsung dengan pihak terkait. Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel yang lebih berbeda, baik dari segi ukuran atau jenis pendapatan daerah lainnya dan variabel non keuangan lainnya (seperti aspek kebijakan anggaran pemerintah dan kebijakan publik).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adisasmita, Rahardja, *“Pembiayaan Pembangunan Daerah”*, Yogyakarta: Graha, 2011.
- Amin, Fadillah, *“Penganggaran Di Pemerintahan Daerah”* Malang : UB Press , 2019.
- Attariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Lampung, *“Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2019”*, (Bandar Lampung, CV. Jaya Wijaya).
- Badrudin, Rudy, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012.
- Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS Dan EVIEWS*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Erfanie, Sairi, Kebijakan Anggaran Pemerintah, dalam Buku *“Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Upadate PLS Regresi*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- Halim, Abdul, *“Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah”*, Jakarta “ Salemba Empat, 2002.
- \_\_\_\_\_, *“Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah”*, Jakarta “ Salemba Empat, 2007.
- \_\_\_\_\_, *“Analisis Investasi”*, Jakarta: Salemba Empat, Edisi kedua, 2011.
- \_\_\_\_\_, *“Akuntansi Keuangan Daerah”*, Jakarta : Salemba Empat, Edisi Ke Empat, 2014.
- Harahap, Sofyan syafri, *“analisis laporan keuangan”*, jakarta: PT. Raja grafindo, 2004.
- Huda, Nurul, dkk, *Keuangan Publik Islami*, Jakarta: KENCANA, 2016.
- Juliansyah, Nor, *Analisis Data Penelitian Ekonomi dan Manajemen*, Jakarta: PT. Grasindo, 2014.
- Kaho, Josef Riwu, *“Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Khusaini, Moh, *Keuangan Daerah*, Cet I, Malang, UB PRESS, 2018.
- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Mardiasmo, *“Perpajakan Edisi Revisi”*, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Muhammad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafido Persada, 2013.
- Nurholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo, 2007.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Bank Indonesia/P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

- Sriyana, Jaka, *“Metode Regresi Data Panel”*, Yogyakarta : Ekosiana, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta : Balai Pustaka Press, 2015
- Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013
- Tresch, Richard. “ Finance Public Anormative Theory ”.Department of Economic , Boston College Chestnut Hill, Massachusetts, 2002.
- . Widarjo, Agus, *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya*, Jakarta : Ekonosia, 2013.
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia* ,Jakarta : Rajawali pers, 2013.
- Yuliati, *Akutansi sektor public*, cetakan kelima, salemba empat, Jakarta, 2000.
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011.

#### **Jurnal dan hasil penelitian :**

- Abdullah, S., & A. Halim, “Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten / Kota Di Jawa Dan Bali”. Sipsium Nasional Akuntansi VI, (2003).
- Abdullah, Syahriar Dan Listia Riani, Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat, Jurnal Widya Ganecwara, Vol.10 No.4, Issn 2723-7125, Oktober, 2020.
- Adriani & Yasa. “ Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali”. E-Jurnal EP Unud, Vol.4 No.11. (2015).
- Amalia, Wia Rizki, Wahyudin Nor dan M.Nordiansyah, “Fenomena *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2009 – 2013”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.15 No.1 (Februari 2015).
- Ansori, Wakhid & Muthmainah, “Fenomena Flypaper Effect Atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Bali Dan Nusra”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.18 No.2, Agustus 2018.
- Ardiansyah, Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia, Volume 2, No.2, H.1-3, (April 2019).
- Dayanti, Elfira Rahma, Arman Delis, dan Emilia, “*Flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi”, *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol.7 No.3 (Desember 2018).
- Ekawarna, Shita Unjaswati, “Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi), Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 3, Januari – Maret 2017 ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 .



- Fadilah, Haris Dan Nayang Helmayunita, “Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia”, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 2, No 3, Seri C, Agustus 2020.
- Fauzan, Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam Di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khattab*, *Jurnal: Human Falah*, Vol.4 No.1 Januari –Juni 2017.
- Inayati, Nur Isna dan Doddy Setiawan, “Fenomena FlyPaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.1 No.2, Juni 2017.
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kep. Lampung. (2019). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Lampung 2019*.
- KS., Ishak, Rudy Arafah, dan Hasnah M, “*Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kota Parepare”, *jurnal ekonomi dan bisnis*, Vol.2 No.2, Agustus 2019.
- Kuncoro, H, Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi X*, 2007.
- Maimunah, Mutiara. 2006. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi UMUM (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Makalah disampaikan dalam Symposium Nasional Akuntansi. Padang, 23 – 26 Agustus 2006.
- Mulya, Rahmatul dan Bustamam, Pengaruh Flypaper Effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh (Studi Empiris pada Pemeritah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No. 2, (2016).
- Ningsih, Indah, Anik Malikhah, Dan Siti Aminah Anwar, Analisis *Flypaper Effect* Dari Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd ) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019, *E-Jra* Vol. 10 No. 01 Februari 2021.
- Nurhayati dan Diana Septiana, “*Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Di Pulau Sumatera”, *media ekonomi* vo.1 26, no. 2 (Oktober 2018).
- Pramuka, Bambang Agus, “Flypaper effect pada pengeluaran pemerintah daerah di Jawa, *jurnal ekonomi pembangunan*”, Vol.11 No.1, (Juni 2010).
- Pradipta, Woro Tiyas dan Bambang Jatmiko, “Pengaruh Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2014 -2016)”, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 2 No. 2, Hlm: 171-185, Desember 2018.
- Putri, Zolla Maretia, *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, E-ISSN: 2460-0585.
- Rahmawati, Lilik, “Kebijakan Fiskal dalam Islam”, *Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 2, Desember 2008.
- Rahmawati, Luluk Atika dan Bambang Suyono, “*Flypaper effect* dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah”, *jurnal ilmu dan riset akuntansi*, Vol.4, No.9.
- Rianti, Irma Dwi April, Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur), *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, E-ISSN : 2460-0585.
- Sasana, Hadi. “Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal”. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*. Vol.18 No.1. (2011).
- Sihombing, Esra Erikson & Anthonius H Citra Wijaya, “*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Papua”, *jurnal akuntansi dan keuangan daerah*, Vol.11 No.1 Mei 2016.

- Solikin, A, “Analisis Flypaper Effect pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 16(1), 2016.
- Suyanto, “*Flypaper effect theory* dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal”, *jurnal ekonomi pembangunan* Vol. 11 No. 1.
- Tuaputimain, Yohanis, “*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah”, *Jurnal Akuntansi*, vol.2 No.2, Oktober 2019.

**Sumber Online :**

Definisi fenomena (online), tersedia di : <https://kbbi.web.id/fenomena>

**Peraturan Perundang-undangan :**

UU Nomor 34 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3